

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN NEGARA SEKTOR  
PERPAJAKAN, PENGELUARAN BELANJA SEKTOR KESEHATAN,  
INFLASI SERTA INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI) TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1990-2021**

**(Tesis)**

**Oleh**

**SELLY HANIFIAH**

**NPM 2121031033**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN NEGARA SEKTOR  
PERPAJAKAN, PENGELUARAN BELANJA SEKTOR KESEHATAN,  
INFLASI SERTA INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI) TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1990-2021**

**Oleh**

**SELLY HANIFIAH**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PERPAJAKAN, PENGELUARAN BELANJA SEKTOR KESEHATAN, INFLASI SERTA INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1990-2021**

**Oleh**

**SELLY HANIFIAH**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris atas gap penelitian terdahulu antar variabel, kemudian menganalisis pengaruh antara penerimaan negara sektor perpajakan, pengeluaran belanja sektor kesehatan, inflasi, dan penanaman modal asing langsung (FDI) pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1990-2021. Negara Indonesia dipilih sebagai objek penelitian dengan pertimbangan bahwa ekonomi telah tumbuh mengesankan dan berkontribusi pada perekonomian global. Singkat gambaran kebijakan yang dikembangkan selama periode penelitian disajikan untuk memberikan wawasan tentang kebijakan yang diambil pemerintah. Data dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 1990 sampai dengan 2021. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear dengan *eviews 10*. Hasil penelitian ini pada variabel penerimaan negara perpajakan dan pengeluaran belanja kesehatan menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian pada variabel inflasi dan investasi asing langsung (FDI) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya keterbatasan dalam data time series menyebabkan pengujian yang sempurna tidak dapat dipenuhi.

**Kata kunci: Penerimaan Negara Perpajakan; Pengeluaran Belanja Kesehatan; Inflasi; Investasi Asing Langsung (FDI); Pertumbuhan Ekonomi; *eviews 10*, Regresi Linear**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE EFFECT OF STATE REVENUE IN THE TAX SECTOR, EXPENDITURE IN THE HEALTH SECTOR, INFLATION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA IN 1990-2021**

**By. SELLY HANIFIAH**

This study aims to obtain empirical evidence on previous research gaps between variables, then analyze the effect between state revenues in the tax sector, health sector expenditures, inflation, and foreign direct investment (FDI) on economic growth in Indonesia in 1990-2021. Indonesia was chosen as the object of research considering that the economy has grown impressively and contributed to the global economy. A brief overview of the policies developed during the research period is presented to provide insight into the policies taken by the government. The data in this study is time series data from 1990 to 2021. Hypothesis testing using linear regression method with eviews 10. The results of this study on the variables of state revenue, taxation and health expenditure show that it has no effect on economic growth. The results of research on inflation variables and foreign direct investment (FDI) have a significant effect on economic growth. The existence of limitations in time series data causes perfect testing cannot be met.

**Keywords: State Revenue Taxation; Health Expenditure; Inflation; Foreign Direct Investment (FDI); economic growth; eviews 10; Linear Regression**

**PERSETUJUAN**

Judul Tesis : **Analisis Pengaruh Penerimaan Negara Sektor Perpajakan, Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan, Inflasi Serta Investasi Asing Langsung (Fdi) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1990-2021**

Nama Mahasiswa : **SELLY HANIFIAH**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2121031033

Jurusan : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.**

**Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.**

Nip. 19740312 200112 1 003

Nip. 19790721 200312 2 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt**

Nip. 19750620 200012 2 001

## MENGESAHKAN

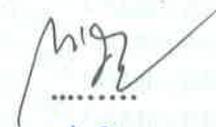
## 1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.**

Sekretaris : **Dr. Liza Alvia, S.E., M.SI., Akt.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.** .....

Anggota Penguji : **Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si**

**Nip. 19660621 199003 1 003**



## 3. Direktur Program Pascasarjana

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

**Nip. 19710415 199803 1 005**



Tanggal Lulus Ujian Tesis : **8 November 2023**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Selly Hanifiah  
NPM : 2121031033

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Negara Sektor Perpajakan, Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan, Inflasi Serta Investasi Asing Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1990-2021” adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.

Bandar Lampung,

2023

Penulis



**Selly Hanifiah**

**NPM. 2121031033**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Selly Hanifiah lahir di Cirebon Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober 1983, anak sulung dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan ayahanda Muhammad Abbas dan ibunda Hanny Burhaniah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar negeri satu gesesik wetan kelulusan tahun 1995, melanjutkan sekolah menengah pertama negeri satu gesesik kelulusan tahun 1998, lalu melanjutkan sekolah menengah umum negeri dua kotamadya cirebon kelulusan tahun 2001, dan menyelesaikan jenjang strata satu di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2005.

Penulis berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 2011 sebagai staff bagian keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Sebelum menjadi abdi negara penulis bekerja diperusahaan Penanaman Modal Asing berasal dari Amerika Serikat bergerak pada bidang *manufacture* dibagian *Accounting* dari tahun 2005 hingga tahun 2009.

Penulis melanjutkan jenjang pendidikan strata dua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung, mendaftarkan diri pada tahun 2021 dan alhamdulillah telah dilaksanakan ujian Tesis pada tanggal 8 November 2023 untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang telah selsai disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Akuntansi yang berjudul **Analisis Pengaruh Penerimaan Negara Sektor Perpajakan, Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan, Inflasi Serta Investasi Asing Langsung (Fdi) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1990-2021.**

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan daya kepada penulis, serta motivasi support suami anak-anak orang tua adik-adik sehingga mampu menyelesaikan tahap ini, semoga terus berproses menjadi lebih baik dan bermanfaat. Sebagai penutup penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah Terimakasih Ya Allah.

## MOTTO

Tugas manusia hanya sebatas berupaya dan berjuang bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala tapi Allah punya kendali. Yakinlah, jika Allah Sudah ikut andil maka tidak ada kata mustahil.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata  
**“Jadilah”** Maka jadilah sesuatu itu (QS Yasin: 82)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan” (QS Ar Rahman)

SEDERHANA, semoga apa yang sedang diperjuangkan membuahkan  
 KEBAHAGIAAN ‘Aamiin Ya Robb

**PERSEMBAHAN**

**أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

**Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam teriring semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.**

**Kupersembahkan tesis ini**

**Sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:**

**Diriku, Makasih sudah berjuang, bertahan, dan kuat sudah sampai di titik ini.**

*I love myself!♥*

**Suami Tersayang Dimas Yogha Pratama, Anak-anaku Cintaku Queena,  
Saladin, Saif**

**Kedua Pasang Orang Tuaku Tersayang Papa Abbas - Mama Hanny,  
Papa Soemantri – Mama Rosita**

**Adik-adik Tersayang Hanif – Fika, Fathin, Adit – Anna, Hario – Ade**

**Keponakan Tersayang Astha, Mikhayla, Ghani, Ghaiza**

**Serta Almamater tercinta Universitas Lampung**

**♥Terimakasih atas do'a, waktu, kesempatan, dan supportnya ♥**

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Pengaruh Penerimaan Negara Sektor Perpajakan, Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan, Inflasi Serta Investasi Asing Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1990-2021”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan tesis ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan juga dukungan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan materil, moral dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si, Ak., Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi dan sebagai dosen pembahas satu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan waktu, dukungan, arahan, dan masukan selama bimbingan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.SI., Akt. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan waktu, dukungan, motivasi, dan inspirasi selama bimbingan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan arahan dan saran selama penyelesaian tesis ini.
8. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan arahan dan saran selama penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh Dosen Program Study Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan inspirasi yang berharga dalam penelitian, dan pembelajaran bagi penulis selama menempuh pendidikan.
10. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.
11. Support sistem utama suami tersayang selalu mendukung dan selalu ada saat dibutuhkan terimakasih ayang gemoy.
12. Support sistem Anak-anaku, terimakasih kesempatan waktunya dan mohon maaf waktu yang terabaikan untuk kalian selama proses awal hingga tuntas ini.
13. Mama-papa, adik-adik, keponakan yang senantiasa mendukung, mendorong, dan mendoakan tiada henti agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan perkuliahan.
14. Kedua Mbak ku tersayang satu perjuangan yang selalu mendukung dan selalu direpotkan Novi Astuti & Dewi Pamungkas Ratnasari.
15. BosQue Ketje Donna Febiola Indriani yang selalu mengizinkan anak buahnya ngilang-ngilang disela-sela jam kantor dalam menyelesaikan studi ini.
16. Sahabat Genk Semprul Nuraini Yunita, Lucy Amelia, Arief Sangajie, Andrianto, terima kasih sudah menghibur. Sahabat julid pedas tiada tara Dinna Nurmalitasari, Agung Wahyu Purwanto, Eko Priadi mulut kalian membuat kami bertahan dan berjuang.

17. Teman-teman bimbingan bersama yang pantang menyerah Mbak Indah, Peti, Hasna, Sella, Mbak Indri, Mas Wempy.
18. Teman-teman MIA 2021 yang sering di Japri pagi siang malam: Mbak Navira, Mbak Intan, Mbak Rindy, Mbak Erni, Mbak Imas, Adek Maria.
19. Teman-teman Mia 2021 satu perjuangan Ayu, Liani, Melly, Mbak Yuni, Mbak Ria, Mbak Ani, Putri, Sema, Desy, Nanda, Arum, Rachma, Bunga, Habib, Mas Hendra, Mas Fitra, Mas Bimo, Mas Panca, Mas Sigit, Reinardi, Ginan, Farid, Ikmal, Irfan, Basith semoga semakin sukses.
20. Admin Mia yang selalu di repotin pagi, siang, malam dari sebelum daftar sampai tuntas Mbak Tina sayang Terimakasih.
21. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian studi ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Terima kasih.

Bandar Lampung, November 2023

**Selly Hanifah**

**NPM. 212103103**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
MOTTO .....	ix
PERSEMBAHAN .....	x
SANWACANA .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>20</b>
1.1 Latar Belakang .....	20
1.2 Rumusan Masalah .....	26
1.3 Tujuan Penelitian .....	26
1.4.1 Manfaat Penelitian .....	26
1.4.1.1 Manfaat Teoritis .....	26
1.4.2 Manfaat Empiris .....	27
1.4.3 Manfaat Praktis .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
2.1 Landasan Teori .....	28
2.1.1 Teori Keynes .....	28
2.1.2 Hukum Wagner .....	29

2.1.3	Teori Harrod - Domar.....	30
2.1.4	Teori <i>Macro Accounting</i> .....	30
2.2	Pertumbuhan Ekonomi .....	32
2.3	Penerimaan Negara Sektor Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	33
2.4	Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	37
2.5	Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi .....	40
2.6	Investasi Asing Langsung (Fdi) dan Pertumbuhan Ekonomi.....	43
2.7	Penelitian Sebelumnya .....	47
2.8	Pengembangan Hipotesis .....	55
2.8.1.	Penerimaan Negara Sektor Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	55
2.8.2.	Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	55
2.8.3.	Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi .....	56
2.8.4.	Investasi Asing Langsung (FDI) dan Pertumbuhan Ekonomi.....	57
2.9	Kerangka Penelitian .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>59</b>
3.1	Populasi Dan Sampel Penelitian.....	59
3.2	Jenis Dan Sumber Data .....	59
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	60
3.4	Definisi Operasional Variabel .....	60
3.4.1	Variabel Dependen .....	60
3.4.2	Variabel Independen .....	61
3.4.2.1.	Penerimaan Negara Sektor Perpajakan.....	61
3.4.2.2.	Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan .....	61
3.4.2.3.	Inflasi .....	62
3.4.2.4.	Investasi Asing Langsung.....	62
3.5	Metode Analisis Data .....	63
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	63

3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	63
3.5.2.1.	Uji Normalitas .....	64
3.5.2.2.	Uji Multikoleniaritas .....	64
3.5.2.3.	Uji Heteroskedastisitas .....	64
3.5.3.1.	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64
3.5.2.4.	Uji Autokorelasi .....	65
3.5.3	Uji Hipotesis Regresi Linear .....	65
3.5.3.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	66
3.5.3.3.	Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t).....	66
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>67</b>
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian .....	67
4.1.1	Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2021.....	67
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	69
4.3	Uji Asumsi Klasik .....	80
4.3.1	Uji Normalitas .....	80
4.3.2	Uji Multikoleniaritas .....	80
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	81
4.3.4	Uji Autokorelasi .....	82
4.4	Uji Hipotesis Regresi Linear .....	83
4.4.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	83
4.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	83
4.4.3	Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t).....	84
4.4.3.1	Pengaruh Penerimaan Negara Sektor Perpajakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	85
4.4.3.2	Pengaruh Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	86
4.4.3.3	Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	86

4.4.3.4	Pengaruh Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	86
4.5	Pembahasan Hipotesis .....	87
4.5.1	Pembahasan Pengaruh Penerimaan Negara Sektor Perpajakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	87
4.5.2	Pembahasan Pengaruh Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	90
4.5.3	Pembahasan Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	93
4.5.4	Pembahasan Pengaruh Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	95
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
5.1.	Kesimpulan .....	97
5.2.	Implikasi .....	99
5.2.1	Implikasi Teoritis .....	99
5.2.2	Implikasi Empiris .....	99
5.2.3	Implikasi Praktis.....	100
5.3.	Keterbatasan dan Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>103</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Grafik Negara G-20 .....	21
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	58
Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi (GDP) Tahun 1990-2021.....	67
Gambar 4.2 Grafik Trend 5 Variabel Selama 32 Tahun .....	70
Gambar 4.3 Grafik Trend GDP - Penerimaan Sektor Pajak 32 Tahun .....	72
Gambar 4.4 Grafik Trend GDP - Pengeluaran Sektor Kesehatan 32 Tahun.....	74
Gambar 4.5 Grafik Trend GDP - Inflasi 32 Tahun .....	75
Gambar 4.6 Grafik Trend GDP - FDI 32 Tahun .....	76
Gambar 4.7 Grafik Uji Normalitas.....	80

**DAFTAR TABEL**

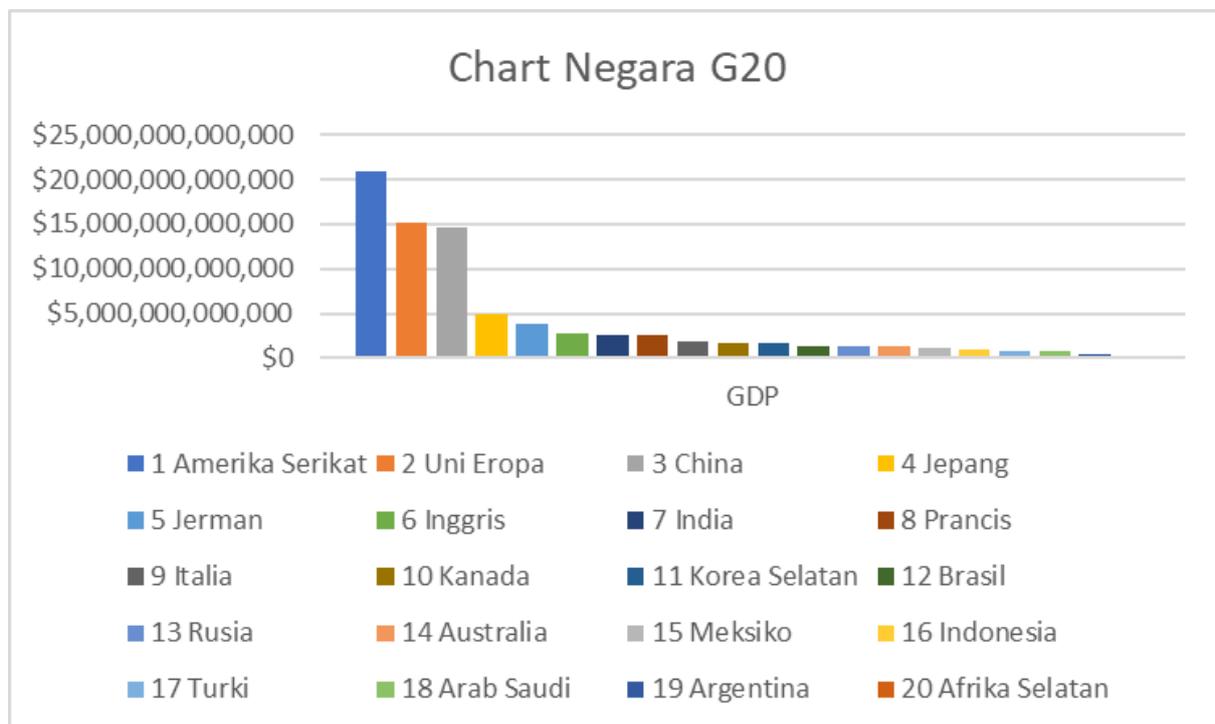
Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya.....	47
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	77
Tabel 4.2 Uji Multikoleniaritas .....	81
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	82
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi .....	82
Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi.....	83
Tabel 4.6 Uji Statistik F.....	84
Tabel 4.7 Pengujian Hipotesis.....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan *output* yang berkesinambungan sebagai indikator keberhasilan negara (Todaro and Smith, 2009). Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) jumlah nilai barang jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDB merupakan salah satu bagian dari akuntansi makro yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto performa perekonomian Indonesia berada di jalur yang baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada awal sembilan puluhan menjadi tahun terbaik, mampu tumbuh dengan rata-rata 8,2% pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Menurut Bank Dunia Preston, (1993) pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,3% per tahun selama periode tersebut. Bank Dunia mencatat Indonesia sebagai “*The East Asian Miracle*” dipublikasikan pada tahun 1993. Negara Indonesia masuk kedalam kelompok elit “*High Performing Asian Economies*” (HPAEs) oleh Bank Dunia, karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Menurut Data World Inequality Report (WIR) 2022, ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang per September 2022. Jumlah ini naik dibandingkan pada akhir Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang, menunjukkan bahwa belum menunjukkan perbaikan kesenjangan. Artinya, ketimpangan dari waktu ke waktu masih sama saja seperti sebelumnya. Adanya fenomena tersebut maka penelitian ini menarik dilakukan.



*Sumber: World Bank, 2023*

Gambar 1.1 Grafik Negara G-20

Berdasarkan Gambar 1.1 PDB Indonesia berada di urutan ke-16 pada forum G20. PDB dihitung melalui tiga pendekatan salah satunya pendekatan pendapatan. Penopang pendapatan negara terbesar adalah sektor perpajakan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi kebijakan fiskal melalui pendapatan negara bersumber dari pajak sebagai instrument keuangan yang digunakan pembangunan mencapai kesejahteraan suatu negara. Indonesia negara di Asia Tenggara satu-satunya anggota G20 dianggap berpengaruh mewakili 80% ekonomi global dan mampu memberi kontribusi pada perekonomian sekaligus menjaga stabilitas keuangan dunia. Kemampuan Indonesia dari tahun 1990 hingga saat ini dapat melalui hingga pulih menghadapi beberapa kali resesi sehingga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia *steady growth*. Konsistennya pertumbuhan ekonomi maka tujuan bernegara tercapai yaitu memajukan kesejahteraan umum dan keadilan yang merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4.

Pemerintah mencapai *over target* penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar 103.9%. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menyusun beberapa strategi

melalui kenaikan tarif beberapa jenis pajak didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) disahkan menjadi undang-undang pada 7 Oktober 2021. UU HPP yang sebelumnya bernama UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan upaya pemerintah mewujudkan reformasi sistem perpajakan. Aturan baru terdapat dalam UU HPP terdiri atas Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP), PPh Badan, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), dan penghapusan tarif pajak minimum untuk perusahaan merugi. Adanya inkonsistensi, pajak sebagai instrumen penopang pertumbuhan ekonomi, disisi lain pemerintah menaikkan tarif. Masih menjadi pertanyaan peran pajak bagi pertumbuhan ekonomi. Banyak penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut namun hasilnya berbeda-beda. Banyak hasil riset yang menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Ogeh et al., (2008), Adriansyah (2014), Adkisson and Mohammed (2014), Afuberoh and Emmanuel (2014), Jalata (2014), Stoilova (2017), Takumah and Iyke (2017), Onakoya et al., (2017), Kalaš et al., (2018), Sumaryani (2019), Agunbiade and Idebi (2020), Lesfandra (2021), Saragih (2022) Beberapa peneliti menyimpulkan pajak tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Bambang (2022), Laranga et al., (2017), Ojede and Yamarik (2012), Pratama dan Widyastuti (2022), Ardani et al., (2010), Agunbiade and Idebi (2020), Ogeh et al., (2008), Gale et al., (2015), Adu (2013). Uraian tersebut menunjukkan masih adanya gap empiris, untuk itu peneliti tertarik menggunakan perpajakan sebagai variabel pada penelitian ini.

Kesehatan termasuk kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dan indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada lima alokasi *mandatory spending* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah setiap tahun mengalokasikan belanja wajib dialokasikan dengan persentase tertentu disebut *mandatory spending*, yaitu peruntukan belanja pengeluaran negara yang besarannya sudah diatur oleh Undang-Undang salah satunya belanja fungsi kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 171 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehingga akan menghasilkan output dan peningkatan pendapatan bagi individu/perusahaan kemudian melakukan konsumsi (dan atau berinvestasi), maka pendapatan negara dari pajak akan meningkat dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Undang-undang tersebut tegas mengamanatkan bahwa

minimal alokasi anggaran kesehatan 5% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara di luar gaji. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan setiap negara minimal 15% dari total APBN diluar gaji. Realisasi alokasi anggaran kesehatan Indonesia itu masih jauh dari jumlah ideal dari ketetapan.

Hasil penelitian terdahulu antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi masih bervariasi satu sama lainnya, baik teori ekonomi maupun bukti empiris tidak memberikan hasil yang sama antara pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa belanja pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Wihastuti (2008), Devarajan et al., (1996), Gupta et al., (1998), Fazzari (1994), Sari et al., (2016), Anggraeni (2015), Maulid et al., (2021), Irandoust (2019), Abdulrasheed (2017), Danladi et al., (2015), Jamil dan Santosa (2017) namun, beberapa peneliti telah menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa peneliti menyatakan berpengaruh negatif belanja pengeluaran sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi oleh Kar dan Taban (2003), Yumuşak dan Yıldırım (2009), Khan et al., (2020), Halıcı-Tülüce et al., (2016). Dengan fenomena tersebut peneliti tertarik menggunakan pengeluaran belanja fungsi sektor kesehatan dijadikan variabel penelitian ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami inflasi 5,51% tahun 2022, menjadi rekor inflasi tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Terjadi kelangkaan minyak goreng dan penetapan kebijakan satu harga minyak goreng. Kenaikan harga avtur yang mendorong kenaikan tarif angkutan udara. Terjadi anomali cuaca di berbagai wilayah yang mengakibatkan gagal panen beberapa komoditas hortikultura sehingga memicu kenaikan harga. Pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite 30,72%, Solar naik 32,04%, dan Pertamax naik 16%. Institusi pemerintahan yang baik perpanjangan tangan negara, peran kunci memastikan bahwa kebijakan ekonomi dikelola secara efektif untuk kestabilan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia, untuk membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi di masa mendatang (ekspektasi inflasi) dan memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan dan pelaku pasar. Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil sehingga kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu acuan yang digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi merupakan sebuah fenomena moneter dalam suatu negara, naik turunnya inflasi mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Pemeliharaan stabilitas harga menjadi tujuan utama dari kebijakan ekonomi diberbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan berpendapat bahwa inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Ardani et al.,(2010), Chowdhury and Mallik (2001), Mubarik (2005), Umaru dan Zubairu (2012), Lubis (2012), De Gregorio (1992), Fischer (1993), Quartey (2010), Kasidi (2011), Izzah (2015), Herman (2017), Pratama dan Widyastuti (2022). Beberapa peneliti yang menganggap inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Paul et al., (1997), Barro (1991), Marbuah (2010), Sidrauski (1967), adanya gap hasil penelitan terdahulu maka peneliti tertarik menggunakan inflasi sebagai variabel penelitian.

Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah, salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Institusi yang berkualitas menyebabkan peningkatan pendapatan yang lebih besar, peningkatan produktivitas, meningkatkan *global value chain*, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan secara umum akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor. Menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Percepatan pembangunan diberbagai sektor strategis nasional serta menstimulasi peningkatan daya saing ekonomi dalam menghadapi dinamika globalisasi ekonomi, dan mengatur ketentuan bidang penanaman modal asing. Ada gap literatur pengaruh antara investasi asing langsung (FDI) dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai penelitian diperoleh kesimpulan yang berbeda-beda sampai saat ini mengenai kontribusi investasi asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. FDI memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menurut beberapa peneliti Dowling and kitchen (1988), Brecher dan Abbas (1972), Islam (1978), Jacoby (1966), Kruege (1978), Begley (1978), Gupta dan Islam (1983), Putri et al., (2015), Borensztein et al., (1998), Le and Suruga, (2005), Nair-Reichert and Weinhold, (2001), Hong (2014), Chakraborty and

Basu (2002), Pelinescu and Dulescu (2009), Rumlatur et al., (2022), Szkorupová (2014), Pangarkar et al., (2011). Akan tetapi ada perbedaan hasil penelitian bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kholis (2012), Hapsari dan Prakoso (2016), Ang (2009), Kitchen (1988), Haddad and Harrison (1993), Lichtenberg and Potterie (1996).

Pengelolaan lokal dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi nilai serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Gamayuni, 2016). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Rinova dan Dewi, 2021). Teknologi informasi untuk berinteraksi dengan publik, menyediakan informasi untuk bisnis, layanan antar pemerintah, pemerintah dan masyarakat, itu akan dapat mendukung pembangunan ekonomi karena teknologi membantu pemerintah (Aprilia et al., 2022). Penelitian sebelumnya, yang dijadikan acuan penelitian ini diantaranya menurut Maulid et al., (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Analysis of Causality among Tax Revenue, State Expenditure, Inflation, and Economic Growth in Indonesia between 1973 and 2019*. Menurut Landau (2013) dengan judul *Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study*. Menurut Pratama dan Widyastuti (2022) dengan judul *Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Peneliti Maulid et al., (2022) menggunakan variabel penerimaan pajak dengan *Endogenous Growth Theory*, pengeluaran negara secara keseluruhan, inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memiliki pembeda dalam menggunakan variable independen penerimaan sektor perpajakan merujuk pada Teori Keynes, variabel independen pengeluaran pemerintah yang lebih spesifik berdasarkan fungsi dari sektor kesehatan, dan yang terakhir variabel independen merujuk saran dari peneliti terdahulu Maulid et al., (2022) untuk mengkaji lebih jauh pengaruh antara variabel investasi, pertumbuhan ekonomi atau variabel lainnya, sehingga penelitian ini menambahkan variabel Investasi Asing Langsung (FDI), sebagai kebaruan. Serta adanya perbedaan pada metode alat analisis pengujian hipotesis penelitian menggunakan *eviews-10*. Penelitian ini akan mengeksplorasi pengaruh variabel penerimaan negara sektor perpajakan, pengeluaran pemerintah dilihat dari sektor kesehatan, inflasi, dan *Foreign Direct Investation (FDI)* sebagai faktor-faktor yang memiliki pengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. Penulis mengambil judul **“Analisis Pengaruh Penerimaan Negara Sektor Perpajakan,**

## **Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan, Inflasi, serta Investasi Asing Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1990-2021”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerimaan negara sektor perpajakan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Apakah pengeluaran belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Apakah Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Apakah FDI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk dan memperoleh bukti empiris atas gap penelitian terdahulu antar variabel, kemudian menganalisis pengaruh antara penerimaan negara sektor perpajakan, pengeluaran belanja sektor kesehatan, inflasi, dan penanaman modal asing langsung (FDI) pada pertumbuhan ekonomi. Maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris atas pengaruh penerimaan negara sektor perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk memperoleh bukti empiris atas pengaruh pengeluaran belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk memperoleh bukti empiris atas pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Untuk memperoleh bukti empiris atas pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

#### **1.4.1. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi pada pengembangan teori ilmu akuntansi khususnya pada *macroaccounting* sektor publik. Dapat memberikan bukti dan tambahan informasi apabila hipotesis yang di asumsikan dapat mengkonfirmasi teori yang digunakan pada penelitian ini atas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di

Indonesia terhadap penerimaan sektor perpajakan, pengeluaran belanja sektor kesehatan, inflasi, dan investasi asing langsung.

#### **1.4.2. Manfaat Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenaran serta dapat mengkonfirmasi hasil penelitian-penelitian terdahulu, menambah literatur bagi penelitian selanjutnya dalam lingkup faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap sektor perpajakan, pengeluaran belanja sektor kesehatan, inflasi, dan investasi asing langsung.

#### **1.4.3. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembuat kebijakan (*policymakers*) untuk menentukan praktik perumusan dalam penentuan suatu kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi penerimaan negara perpajakan, pengeluaran belanja sektor kesehatan, inflasi, dan investasi langsung asing guna memprediksi kestabilan pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun dimasa yang akan datang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi terhadap menentukan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi agar memaksimalkan perolehan realisasi penerimaan pajak nasional yang merupakan salah satu sumber pendapatan, guna melakukan pembangunan perekonomian dengan memprioritaskan pengeluaran sektor kesehatan, mengendalikan dan mengontrol tingkat inflasi, memperbesar lapangan pekerjaan melalui FDI, dan meningkatkan kesejahteraan SDM sebagai pelaku ekonomi dengan memperbaiki mutu pelayanan serta fasilitas kesehatan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keynes**

Teori yang dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes di tahun 1930an. Teori Keynes merupakan teori umum yang berlaku secara menyeluruh dalam ekonomi. Kebijakan intervensi ekonomi oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan (Keynes, 1937). Keynes mengemukakan gagasan kebijakan publik pada *The General Theory of Employment, Interest and Money (1936)* adalah buku yang menjadi dasar dari Teori kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan publik pemerintah sebagai alat utama yang direkomendasikan Keynesian untuk mengelola ekonomi. Kebijakan fiskal mengatur tentang anggaran pengeluaran pemerintah dan kebijakan penerimaan pendapatan negara. Kebijakan moneter berfokus pada kontrol pemerintah terhadap ketersediaan uang, terlalu sedikitnya uang dapat menghambat aktivitas ekonomi sedangkan terlalu banyak uang yang beredar menyebabkan inflasi. Dua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dengan melalui naiknya permintaan konsumsi, dan berkurangnya pengangguran. Kebijakan intervensionis lainnya, yaitu kontrol langsung dari pasokan tenaga kerja, mengubah tarif pajak, mengubah kebijakan moneter, atau menempatkan kontrol pada pasokan barang dan jasa.

Pendapatan dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh kebutuhan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatan (Palley, 2017). Keynesian menunjukkan pengeluaran belanja pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pengeluaran belanja pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomian. Keynes juga

menyatakan bahwa ada konsumsi *otonomus* yang tetap harus dipenuhi walaupun pendapatan yang dimiliki sama dengan nol. Teori Keynes mengemukakan pandangan konsumsi yaitu Pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan, dimana konsumsi cenderung lebih kecil dari pendapatan, dapat melakukan tambahan konsumsi jika pendapatannya semakin besar juga. Kesimpulan Teori Keynes adalah pendapatan meningkat, pengeluaran belanja pemerintah bertambah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Konsep pendapatan nasional dengan pendekatan belanja  $Y = C + I + G + X - M$ . Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi oleh pemerintah, I adalah investasi, G adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, X adalah nilai ekspor dan M adalah nilai impor. Variabel pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk menguji teori Keynes (Maulid et al., 2021). Teori Keynes menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berlawanan arah, ketika inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun ataupun sebaliknya Lubis (2012).

### **2.1.2 Hukum Wagner**

Ekonom Jerman, Adolph Wagner (1883) mengemukakan Hukum Wagner yang dikenal *the increasing of state activity*, didasarkan pada pengamatan empiris negara Eropa. Wagner (1883) menyatakan bahwa semakin maju perekonomian, maka peranan pemerintah (dari volume pengeluaran) semakin lama semakin meningkat. Pendapatan perkapita masyarakat meningkat, yang diikuti oleh peningkatan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang jasa publik bagi masyarakat. Tendensi ini makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat seperti hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya sehingga meningkatnya pembangunan. Hukum Wagner adalah peningkatan aktivitas negara, seperti iringan perubahan sosial tak terelakkan oleh perkembangan, sehingga peningkatan pengeluaran tidak bisa dihindari (Peacock & Wiseman, 1961).

Wagner membedakan antara tiga jenis kegiatan negara: pemeliharaan, penegakan hukum dan ketertiban secara internal dan eksternal. Pertama, bahwa perkembangan aktivitas pemerintah berkaitan dengan fungsi administrasi dan fungsi perlindungan terhadap warga negara dengan lebih banyak penyediaan fasilitas publik (perumahan, fasilitas sanitasi, sarana pendidikan,

kesehatan, dan lain-lain) serta regulasi agar wilayah perkotaan tetap tertata. Kedua, seiring dengan semakin bertambahnya kesejahteraan individu, diindikasikan oleh peningkatan permintaan terhadap barang-barang berkualitas. Ketiga, adanya peningkatan teknologi dan perubahan pola investasi, pendidikan, kesehatan. Perusahaan yang bersifat monopoli akan terbentuk lebih banyak. Regulasi dari pemerintah dan membutuhkan anggaran yang tinggi untuk mengatur monopoli.

### **2.1.3 Teori Harrod - Domar**

Evsey Domar dan R.F. Harrod adalah dua orang ahli ekonomi yang mengembangkan Teori Harrod-Domar menggambarkan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai perekonomian yang teguh (*steady growth*). Teori Harrod-Domar menjelaskan prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek menjadi jangka panjang. Teori Harrod dipublikasikan tahun 1939 dalam *Economic Journal*, tujuh tahun berselang Teori Evsey D Domar dipublikasikan tahun 1947 dalam jurnal *An American Economic Review*. Harrod (1939) dan Domar (1947) tingkat pertumbuhan secara positif berbanding lurus dengan modal investasi, dan secara negatif berbanding terbalik modal investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod Domar pembentukan modal sebagai pengeluaran yang menambah kesanggupan suatu perekonomian menghasilkan barang-barang, apabila pada suatu masa dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang. Harrod-Domar menganggap bahwa penambahan dalam kesanggupan memproduksi itu tidak secara sendirinya, namun melalui meningkatnya permintaan, dampak dari suatu penawaran. Kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercapai, apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan. Penanaman modal yang dilakukan ada dua tujuan: pertama untuk mengganti alat-alat modal yang tidak dapat digunakan lagi, kedua untuk memperbesar jumlah alat-alat modal yang tersedia dalam masyarakat.

### **2.1.4 Teori Macro Accounting**

Pendapatan nasional adalah produk akuntansi terkait erat dengan bidang ekonomi makro yang didirikan oleh John M. Keynes dalam karya monumentalnya *The General Theory of Employment, Interest and Money* Keynes (1937). Peneliti lain yang berkontribusi pada pengembangan akuntansi pendapatan nasional yaitu ekonom Inggris John R. Hicks dan Richard Stone, dan ekonom Norwegia Ragnar Frisch, dan ekonom Amerika Simon Kuznets,

yang semuanya memenangkan hadiah Nobel dibidang Ekonomi. Untuk mengekspresikan disiplin yang baru berkembang ini, Hicks menciptakan istilah Akuntansi Sosial dalam bukunya *The Social Framework: An Introduction to Economics 1942* adalah akuntansi untuk masyarakat atau seluruh bangsa dengan cara yang sama seperti akuntansi bisnis untuk perusahaan individu Hicks (1942).

Akuntansi telah menjadi bidang yang sangat luas dan beragam selama beberapa dekade terakhir. Pesatnya pertumbuhan akuntansi bisnis, ada bidang akuntansi lain yang berkembang pesat yaitu teknik dan prosedur akuntansi untuk analisis makro, hal ini menunjukkan bahwa akuntansi sebagai alat analisis mampu menyediakan data baik secara mikro maupun makro, namun *microaccounting* dan *macroaccounting* tetap terpisah. Ada lima segmen perhitungan *macroaccounting*: neraca nasional, akun pendapatan nasional, tabel input-output, laporan aliran dana, serta neraca pembayaran Yu (2000).

Akuntansi makro digunakan untuk merujuk neraca ekonomi nasional dan akuntansi pendukung yaitu akuntansi ekonomi-lingkungan dan sosio-ekonomi yang saling terintegrasi antara data yang digunakan. *System of National Accounts* (SNA oleh PBB 1953) memanifestasikan elemen akuntansi makro untuk menekankan peran akuntansi makro sebagai instrumen kumpulan data, mengacu khususnya pada akun makro untuk merekonsiliasi data statistik terpisah menjadi kumpulan data yang koheren, bahwa instrumen akun makro dapat diterapkan ke banyak set-data yang berbeda, yang masing-masing dapat dikaitkan dengan berbagai jenis kebijakan. Akuntansi makro digunakan sebagai pedoman salah satu area statistik oleh pengguna kebijakan IMF (2002).

*Macro Accounting Theory* (MAT) menggunakan prinsip akuntansi untuk menganalisis transfer energi, dan perubahan entropi (ketidak beraturan) yang akan menghasilkan sistem terstruktur seperti sistem sosial. Akuntansi memiliki substansi yang menyediakan hubungan dan syarat untuk menerapkan ide ke berbagai jenis sistem. Teori Entropi Sosial menyediakan kerangka kerja yang diperluas untuk menerapkan ide-ide ke sistem sosial, dan makro akuntansi menyediakan sarana untuk mengukur nilai, dengan penanda berupa informasi tertentu yang berulang mengenai organisasi-reorganisasi Swanson and Bailey (2006).

Akuntansi makro menerapkan informasi untuk memprediksi keakuratan yang akan terjadi dimasa depan. Hal ini diperlukan Akuntansi makro masa depan untuk para akuntan mengeksplorasi variabel lain dan efisiensi informasi akuntansi yang dapat mengirim sinyal

tepat waktu tentang keadaan ekonomi masa depan ke pasar, bertanggung jawab atas analisis dan pelaporan data ekonomi yang digunakan untuk mengkonfirmasi dan memprediksi tren ekonomi dan siklus bisnis, dan akuntansi makro menekankan penggunaan informasi akuntansi dalam memprediksi perekonomian dimasa yang akan datang Nasab et al., (2020).

Akuntansi berdasarkan fungsinya memberikan informasi data keuangan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi dapat dianggap sebagai bahasa dalam memberikan nilai informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pertimbangan dalam memutuskan kebijakan. Akuntansi mencakup dua bidang utama; akuntansi mikro dan akuntansi makro (Koguchi, n.d.). Akuntansi mikro adalah bidang akuntansi yang terkait dengan perusahaan, pemerintah kota dan entitas ekonomi individu lainnya yang membentuk masyarakat kita. Akuntansi makro adalah kompilasi data ekonomi untuk suatu negara, dan Juga dikenal sebagai akuntansi nasional, data dasar untuk membentuk, untuk melacak dan memperkirakan kinerja dan pembangunan ekonomi negara dan digunakan untuk membentuk kebijakan pemerintah Liberto (2021).

## **2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Definisi pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2009) peningkatan kegiatan perekonomian menghasilkan barang-jasa diproduksi bertambah, kemakmuran masyarakat dan pendapatan meningkat secara jangka panjang sehingga mempengaruhi output perkapita. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan perekonomian dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi meningkat, menandakan bahwa perekonomian tersebut berkembang dengan baik, dapat memberikan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: pertama Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (kesehatan dan pendidikan). Kedua, Sumber Daya Alam (SDA) dalam bentuk ekspor sangat berdampak pada kondisi keuangan negara. Ketiga, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Keempat, tingkat inflasi. Kelima, suku bunga bank, aspek peminjaman modal dan investasi juga akan meningkat. Keenam, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Faktor terakhir Aspek Sosial Budaya berjalan secara beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat yang meliputi sudut pandang, tingkah laku, bahkan motivasi kerjanya.

Pertumbuhan ekonomi dihitung setiap tahun, sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Metode Perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu negara menurut (Purnamawati & Yuniarta, 2021):

1. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) memperhitungkan seluruh output ekonomi negara (berdasarkan teritorialnya), mencakup semua barang dan jasa total diproduksi untuk dijual di dalam negeri ataupun ke luar negeri, tanpa membedakan faktor produksi yang digunakan berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan membandingkan PDB saat ini dengan tahun sebelumnya.
2. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) sebagai pendapatan negara dalam periode tertentu dan didasarkan oleh penghasilan secara menyeluruh yaitu total output atau produksi seluruh masyarakat sebuah negara, baik itu yang beroperasi di dalam negeri ataupun luar negeri (yang dianggap sebagai pendapatan nasional hanya output yang dihasilkan oleh faktor produksi dari warga negara yang bersangkutan) dengan membandingkan jumlah PNB dari periode saat ini dengan kurun waktu sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan PDB sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi karena PDB meliputi banyak aspek (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dikurangi import), maka PDB merupakan cara terbaik untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara.

### **2.3 Penerimaan Negara Sektor Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Definisi Penerimaan Negara menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, uang yang masuk ke kas negara, hak pemerintah pusat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara, terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku dan biasanya pajak dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

Definisi Pajak menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya dipakai untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum dan pengeluaran pembangunan kemakmuran rakyat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Afuberoh dan Emmanuel (2014) menyatakan pajak sebagai pungutan wajib oleh pemerintah tentang pendapatan, konsumsi dan modal. Jiang (2006) menyatakan bahwa pajak sebagai pungutan wajib yang diberlakukan oleh otoritas pajak atas pendapatan, pengeluaran, kekayaan, tidak ada manfaat yang diterima secara langsung sebagai imbalannya. Ogbonna dan Appah (2016) menyatakan pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah di seluruh dunia. Ebimobowei (2010) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan atas penghasilan, laba, kekayaan, harta benda, barang dan jasa orang pribadi dan badan oleh pemerintah untuk kelangsungan hidup pemerintah dan untuk itu tidak ada jaminan manfaat langsung.

Jenis-jenis pajak dibedakan berdasarkan golongan, sifat, serta lembaga yang memungutnya. Berikut pembagiannya seperti yang dijabarkan oleh Priantara, (2012) Jenis pajak menurut golongan yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar pajaknya sehingga pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain contoh Pajak Penghasilan (PPh). Kedua, pajak tidak langsung, kebalikan dari pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya bisa dialihkan kepada pihak lain, contoh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah. Pajak ini dipungut oleh wajib pajak (pengusaha kena pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajaknya adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh Wajib Pajak tersebut.

Jenis pajak menurut sifat, pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui menentukan objeknya, contohnya wajib pajak dengan besaran penghasilan tertentu harus membayar PPh. Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Jenis pajak menurut lembaga institusi pemungutan, pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak Pajak Pemerintah Pusat menurut Kementerian Keuangan (2014) menjelaskan bahwa jenis-jenis pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat di Indonesia

dapat dirinci sebagai berikut: Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPN/PPnBM), Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penerimaan Cukai, Penerimaan Pajak Lainnya, Bea Masuk, Bea Keluar. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah. Sedangkan pajak Kabupaten / Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Golongan C.

Di Indonesia terdapat beberapa tahap reformasi perpajakan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas efisiensi serta optimis akan tercapainya target penerimaan pajak. Salah satunya pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia. Perpajakan difungsikan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial; bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pajak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan negara, termasuk pembangunan di berbagai bidang dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, maka peningkatan penerimaan pajak secara besar-besaran akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pajak diakui sebagai sumber keuangan terpenting untuk pengeluaran publik pemerintah Hughes (1386). Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pembangunan ekonomi negara. Kebijakan fiskal terus diupayakan pemerintah dalam rangka mendapatkan dana agar menggali potensi sendiri, dan mengurangi ketergantungan pada hutang (pinjaman).

Regulasi pemungutan pajak telah dilakukan dalam banyak model teori pertumbuhan yang diungkapkan oleh teori hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Teori Keynes dengan kebijakan fiskal adalah alat utama yang direkomendasikan untuk mengelola kebijakan intervensi seperti mengubah tarif pajak. Sumber pendanaan yang paling penting adalah pajak dan hutang (pinjaman), akan tetapi jika melakukan pinjaman memiliki biaya tambahan untuk pengembalian sehingga pinjaman tidak diprioritaskan seperti pajak dalam hal urutan preferensi, maka lebih utama memilih pendanaan bersumber dari pajak. Pajak memegang peranan yang sangat penting, pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pentingnya peran dan fungsi pajak menjadi perhatian utama pemerintah, dan penerimaan pajak tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pendapatan perkapita merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan perkembangan menyeluruh dari pertumbuhan ekonomi. Pendapatan perkapita menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode satu tahun Suhendro et al., (2021).

Kontribusi pajak meningkat agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara. Perpajakan merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Masih menjadi suatu pertanyaan tentang peran penerimaan pajak bagi pertumbuhan ekonomi. Banyak penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut namun tidak ada hasil yang sama. Studi empiris tentang hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi juga telah memberikan bukti bahwa berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi oleh banyak peneliti diantaranya, Ogeh et al., (2008), Adriansyah (2014), Adkisson and Mohammed (2014), Afuberoh and Emmanuel (2014), , Jalata (2014), Stoilova (2017), Takumah and Iyke (2017), Onakoya et al., (2017), Kalaš et al., (2018), Sumaryani (2019), Agunbiade and Idebi (2020), Lesfandra (2021), Saragih (2022).Peneliti lain menunjukkan hasil penelitian bahwa pajak memiliki pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi menurut Atems (2015), Ahmad et al., (2020), Yi and Suyono (2014), Nisa, (2017), Levine and Renelt (1992), Agusalim (2014). Pajak memiliki efek non-linear pada pertumbuhan ekonomi, tarif yang lebih tinggi akan berdampak negatif pada pertumbuhan, sementara tarif yang lebih rendah dapat menghasilkan pendapatan yang dibelanjakan Dackehag and Hansson (2012). Tarif pajak yang lebih tinggi menghambat investor dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak perusahaan memiliki dampak negatif pada negara-negara OECD Åsa et al., (2000). Banyak Peneliti lain mengemukakan bahwa pajak tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Suryana (2005), Hamzah (2007), Rudiningtyas (2008),

Iskana (2009), Ardani et al.,(2010), Ojede and Yamarik (2012), Laranga et al., (2017), Bambang, (2022), Pratama and Widyastuti (2022). Ada juga hasil penelitian perpajakan memiliki pengaruh heterogen terhadap pendapatan Durusu et al., (2018).

#### **2.4 Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Definisi Pengeluaran negara berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 adalah uang yang keluar dari kas negara, dan suatu kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengeluaran negara merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah). Sukirno (2000) menyatakan pengeluaran pemerintah yaitu bagian dari kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, atau kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Belanja negara menurut Undang-undang No.28 Tahun 2022 kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil tertentu pada Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Ketentuan pasal 1 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 171 menjadikan alokasi belanja dibidang Kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Pasal tersebut menyebutkan

bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji. Belanja kesehatan adalah jenis belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan. Belanja kesehatan termasuk pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh negara yang dialokasikan untuk pemerataan kesejahteraan kesehatan.

Tujuan dari pembangunan bidang Kesehatan adalah pengeluaran pemerintah dalam upaya *human capital upgrade* mengurangi ketimpangan kesehatan agar tercapainya derajat kesehatan yang membaik untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sebagai salah satu tujuan kesejahteraan negara. Kesehatan merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas ekonomi yang akan meningkatkan daya saing bangsa. Dukungan sumber daya yang terus meningkat dan berkelanjutan dengan penggunaan yang lebih efektif dan efisien merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Covid-19 merupakan permasalahan kesehatan, yang berdampak pada banyak sektor, salah satunya sektor ekonomi yang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun dialami oleh banyak negara di dunia. Pergerakan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dari sektor non pemerintah sangat berat, terdapat ketimpangan pendapatan yang lebar, masyarakat menengah kebawah sangat bergantung pada fasilitas dari pemerintah. Optimalisasi pengeluaran belanja pemerintah pada sektor kesehatan menjadi salah satu upaya penting untuk menggerakkan pemulihan perekonomian negara Indonesia agar percepatan pemulihan perekonomian. Pengeluaran pemerintah diwujudkan dalam bentuk fasilitas publik seperti, rumah sakit, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, apotek, transfusi darah. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga akan diwujudkan dalam bentuk bantuan seperti misalnya untuk membiayai masyarakat yang produktif dan lain sebagainya

Belanja pengeluaran publik meningkat pesat dari tahun ketahun dalam ekonomi nasional, pengeluaran publik menjadi relatif banyak dijelajahi, seberapa besar pengaruh peran belanja pengeluaran berdasarkan fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Banyak penelitian dilakukan dalam menjawab pertanyaan pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun tidak ada hasil yang sama. Gupta et al., (1998) mengungkapkan bahwa

pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan dapat memberikan efek positif terhadap sumberdaya manusia yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Wihastuti (2008) membuktikan pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sari et al., (2016) menyebutkan pengeluaran pemerintah memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Anggraeni (2015) menyatakan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian secara simultan berpengaruh terhadap PDB. Danladi et al., (2015) mengungkapkan penelitian di Nigeria menunjukkan belanja kesehatan pengaruhnya positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jamil dan Santosa (2017) melakukan penelitian di Indonesia, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat disebabkan oleh belanja pendidikan di era reformasi dan belanja kesehatan di era orde baru. Abustan dan Mahyuddin (2009) menyatakan perubahan pengeluaran pemerintah akan memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Suparno (2014) hubungan positif antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Agustina et al., (2016) Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kalimantan Timur. Safira et al., (2019) pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang positif, artinya bila pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan naik maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Nasution et al., (2021) pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Maulid et al., (2021) belanja pemerintah pengeluaran personil, belanja material, belanja modal, pembayaran bunga, subsidi dan pengeluaran sosial secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa peneliti menyatakan berpengaruh negatif belanja pengeluaran sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi, Sebuah studi oleh Kar dan Taban (2003) menyatakan bahwa berpengaruh negatif antara pengeluaran kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Yumuşak dan Yıldırım (2009) menyatakan berpengaruh negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran kesehatan di Turki. Khan et al., (2020) menyatakan peningkatan belanja kesehatan masyarakat melemahkan pertumbuhan ekonomi dengan rendahnya efisiensi dan produktivitas tenaga kerja yang rendah mengurangi kecepatan kegiatan ekonomi. Halıcı-Tülüce et al., (2016) menyatakan bahwa pengeluaran kesehatan publik memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan secara statistik.

Menurut Al-Faris (2002) Pengeluaran publik (kesehatan) tidak dapat instan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, akan ada rentang waktu lama (pengaruh jangka panjang antara pengeluaran kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi), sehingga untuk pengaruh jangka pendek berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Devarajan et al., (1996) Menunjukkan hasil penelitian yang berbeda antara pengeluaran operasional dan pengeluaran belanja modal, pengeluaran operasional memiliki dampak pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan secara statistik, sebaliknya hubungan antara komponen modal belanja publik dan pertumbuhan per kapita adalah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran yang tampaknya produktif, bila digunakan secara berlebihan, bisa menjadi tidak produktif.

## **2.5 Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Inflasi menurut Bank Indonesia suatu keadaan perekonomian di suatu negara terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang jasa secara umum dalam waktu yang panjang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Menurut Badan Pusat Statistik Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang, dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Menurut Sifatnya Tingkat keparahan inflasi antara negara yang satu dengan negara lain tidaklah sama. Laju inflasi tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori yang pertama inflasi perlahan (*Creeping Inflation*) ditandai dengan tingkat inflasi yang relatif moderat (kurang dari 10% per tahun), pertumbuhan harga yang lambat, persentase kecil, dan cakrawala waktu yang agak panjang. Kedua, inflasi menengah (*Galloping Inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang relatif tinggi (biasanya dalam angka ganda atau tiga digit) yang dapat terjadi dalam waktu relatif singkat dan memiliki karakteristik yang mempercepat. Ketiga, Inflasi tinggi (*Hyper Inflation*) peningkatan harga 5-6 kali dan kerugian dramatis nilai uang merosot adalah konsekuensi terburuk, terjadi ketika pemerintah memiliki defisit anggaran.

Inflasi suatu negara dibedakan berdasarkan asal terjadinya digolongkan menjadi dua bagian; *domestic inflation* berasal dari dalam negaranya sendiri, adanya defisit anggaran sehingga mencetak uang baru, peningkatan permintaan agregat sementara produksi berada pada

pekerjaan penuh, sifat yang konsumtif dari masyarakat juga merupakan penyebab dari inflasi jenis ini. Kedua, *imported inflation* berasal dari luar negeri, inflasi ini dimulai dengan kenaikan harga, penurunan pasokan secara keseluruhan sebagai akibat dari peningkatan biaya produksi. Inflasi seperti ini sangat mudah masuki negara-negara yang menganut perekonomian terbuka atau negara-negara yang mempunyai relasi dengan negara yang mengalami inflasi. Inflasi jenis ini merupakan jenis inflasi yang tingkat keparahannya tergantung berapa lama inflasi tersebut terjadi dan berapa lama kelangkaan barang terjadi. Jika proses ini berlanjut akan terjadi *cost push inflation*.

Teori Keynes juga membahas hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah kebijakan moneter pemerintah yang mempengaruhi ekonomi suatu negara, sebagai indikator ekonomi yang digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi suatu negara, ketika perubahan indikator ini akan berdampak pada pola pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga merupakan realitas moneter suatu negara, dimana peningkatan inflasi cenderung menyebabkan kekacauan ekonomi. Menurut Teori Keynes, inflasi terjadi sebagai akibat dari permintaan yang berlebihan terhadap barang-jasa, permintaan meningkat, sementara pasokan tetap konstan mengakibatkan harga naik, dan pemerintah dapat membeli barang-jasa dengan mencetak uang baru. Tingginya inflasi akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, mengakibatkan roda ekonomi tidak berputar, terlalu rendah inflasi bahkan pada tingkat deflasi, dapat menghambat kemajuan ekonomi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Inflasi Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia untuk membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi di masa mendatang dan memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan dan pelaku pasar, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna mencapai pengendalian inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil sehingga kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat dan akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya terutama orang miskin bertambah miskin. Inflasi yang tidak

stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan akan menyulitkan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah, untuk itu pentingnya pengendalian referensi kestabilan harga.

Pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian, inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen. Inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi ringan mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksi, mengingkatkan penjualan sehingga mendapat lebih banyak keuntungan. Peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Perekonomian dunia saat ini menyesuaikan diri dengan inflasi rendah yang berimplikasi pada distribusi peluang pertumbuhan dunia lintas negara. Tidak ada pembenaran untuk kebijakan penargetan inflasi seperti yang saat ini dipraktikkan di seluruh negara berpenghasilan menengah dan rendah, yaitu mempertahankan inflasi pada kisaran 3-5 % Pollin and Zhu (2006).

Chowdhury and Mallik (2001) mengatakan pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat mengakibatkan inflasi atau keadaan ini disebut ekonomi dalam keadaan terlalu panas (*overheating economy*). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang seragam di seluruh negara, Paul et al., (1997). Di banyak negara maju ditemukan hubungan negatif antar keduanya, tetapi kebalikan pada negara berkembang, di mana ternyata pertumbuhan ekonomi dan inflasi berhubungan positif. Ketika tingkat inflasi cenderung tinggi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat ekspor akan terpengaruh secara negatif. Eggoh and Khan (2014) menyatakan hasil penelitian memperkuat pandangan dan memvalidasi fakta bahwa nonlinier antara inflasi dengan pertumbuhan, karena ketika inflasi itu terdapat pada ambang batas atas tertentu dimana inflasi berbahaya dan jika inflasi di bawahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain Ghosh dan Phillips (1998) mempelajari hubungan keduanya dan menemukan hubungan positif tersebut ketika tingkat inflasi rendah, namun hubungan ini menjadi negatif ketika tingkat inflasi tinggi. Mubarik (2005) menemukan bahwa inflasi yang rendah dan stabil mendorong pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya. Herman (2017) Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun dan sebaliknya jika

inflasi turun maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Sampai saat ini, belum ada satu definisi yang pasti mengenai hubungan keduanya. Beberapa ekonom melakukan penelitian yang hasilnya beragam, ada yang beranggapan hubungan keduanya bersifat positif, negatif, bahkan netral.

Inflasi variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Ardani et al., (2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Datta dan Kumar (2011) menyatakan bahwa ada signifikan hubungan jangka pendek Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi tapi tidak dalam jangka panjang. Umaru dan Zubairu, (2012) mengungkapkan bahwa inflasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi melalui mendorong produktivitas dan tingkat output dan evolusi produktivitas faktor total. Lain halnya dengan Sidrauski (1967), tidak ditemukan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, hasil penelitian Izzah (2015) Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh namun kearah negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia Pratama dan Widyastuti (2022). Hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi telah terbukti dalam penelitian oleh Kasidi (2011). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanzania memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. DeGregorio (1992) inflasi yang persisten dapat mengurangi prospek pertumbuhan Eropa Timur seperti yang telah dilakukan di Amerika Latin. Efek negatif dari inflasi pada pertumbuhan jangka panjang Fischer (1993). Quartey (2010) memaksimalkan pendapatan dari inflasi meningkatkan pertumbuhan di Ghana, namun ada dampak negatif inflasi terhadap pertumbuhan. Marbuah (2010) adanya hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi ada ambang batas yang masih bisa ditolerir signifikan dalam kasus Ghana.

## **2.6 Investasi Asing Langsung (Fdi) dan Pertumbuhan Ekonomi**

Penanaman Modal Asing menurut Undang-Undang No. 25 Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpartisipasi dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang

sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Investasi tercipta dari penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak dengan tujuan memperbesar output. Investasi adalah salah satu variabel yang paling penting di bidang ekonomi. Investasi adalah salah satu faktor yang bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi, secara otomatis sebuah perusahaan bisa meningkatkan baik itu dari segi produktivitas ataupun teknologinya, sebab investasi sendiri adalah tambahan modal untuk perusahaan yang menerima investasi. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara bahkan wilayah.

FDI diklasifikasikan menjadi dua jenis: FDI vertikal Sebuah perusahaan atau bisnis berkembang ke negara asing, namun operasionalnya tetap terkait dengan perusahaan induk. Artinya, sebuah perusahaan berinvestasi di lokasi dengan biaya produksi yang lebih murah, kemudian membawa outputnya kembali ke negara asal untuk pengolahan lebih lanjut. Horizontal FDI adalah modal pertumbuhan bisnis ke negara lain untuk memproduksi barang-barang serupa, tujuan dari jenis FDI ini seringkali adalah untuk memungkinkan investor untuk memasuki pasar baru di negara yang berbeda.

Keuntungan FDI meliputi pengembangan hubungan ekonomi yang lebih kuat antara kedua negara. Selain itu, FDI dapat digunakan untuk memfasilitasi transfer teknologi internasional. Selain manfaat dan kelebihan yang berbeda, keberadaan FDI memiliki dampaknya sendiri, terutama bagi negara-negara tuan rumah yang menerima investasi asing, seperti repatriasi keuntungan, yang meningkatkan pergerakan modal dari negara kapitalisasi. Akibatnya, beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menetapkan kebijakan mereka sendiri mengenai FDI. Kekurangan FDI kedua adalah transfer bisnis lokal, yang terjadi ketika perusahaan asing bergabung dengan negara yang terkait dan terlihat menghancurkan bisnis lokal yang ada.

Tiga cara untuk melakukan FDI adalah membeli perusahaan yang ada di suatu negara. Menurut *International Moneter Fund* (IMF), untuk dianggap sebagai FDI, sebuah perusahaan atau individu harus membeli setidaknya 10% dari saham perusahaan di suatu negara. Metode akhir dari FDI adalah untuk membeli atau membangun aset di negara yang terhubung, seperti membeli tanah, barang, atau membangun pabrik. salah satu jenis investasi asing jangka

menengah atau panjang yang dilakukan oleh investor asing, baik sepenuhnya dengan modal asing atau dalam kolaborasi dengan investor domestik (*joint venture*).

Menurut Teori Harrod (1939) Domar (1947) bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang baik, investasi salah satu komponen dalam pendapatan suatu negara dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Harrod (1939) Domar (1947) memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pertama menciptakan pendapatan sebagai dampak permintaan, dan yang kedua memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal sebagai dampak penawaran. Selama investasi tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Lebih banyak modal diperlukan untuk memastikan bahwa, dalam jangka panjang, tingkat pertumbuhan ekonomi selalu lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan populasi, menghasilkan peningkatan kesejahteraan.

Investasi asing langsung (FDI) adalah pendekatan yang paling efektif dan aman untuk mengintegrasikan ke dalam ekonomi global. Dana baru mengalir untuk membantu dana beberapa area yang kurang didanai. FDI menciptakan banyak pekerjaan baru, menurunkan tingkat pengangguran. Investasi asing sering diikuti oleh transfer teknologi, ada potensi investor asing bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM akan membantu perekonomian masyarakat berkembang. UMKM atau perusahaan domestik juga dapat mengiklankan produk mereka di pasar luar negeri. Investasi asing adalah salah satu jalan yang diikuti pemerintah untuk membantu pembangunan Indonesia. Ekonomi dapat tumbuh melalui adopsi teknologi yang lebih produktif. Peran negara adalah untuk memungkinkan transfer teknologi yang sedang berlangsung dengan bekerjasama antara perusahaan domestik dan pemasok teknologi asing; melalui ini, memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat. Meskipun ada banyak faktor yang menentukan arus masuk FDI di negara-negara berkembang, De Mello Jr., (1999) menunjukkan bahwa salah satu faktor terpenting yang menentukan lonjakan arus masuk FDI ke negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah privatisasi dan globalisasi produksi.

Literatur teoritis dan empiris antara investasi asing langsung (FDI) dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda sampai saat ini masih dalam perdebatan mengenai kontribusi investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran berlebihan dalam belanja modal publik dapat menghambat efek menguntungkan dari FDI Le and Suruga (2005).

Pertumbuhan jangka panjang dapat dihasilkan dari kebijakan pemerintah liberalisasi yang lebih terbuka yang kondusif untuk modal asing Nair-Reichert and Weinhold (2001). FDI memberikan pengaruh positif pada pembangunan ekonomi Hong (2014). Chakraborty and Basu (2002) FDI mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Indonesia. Pengaruh signifikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi Putri et al., (2015). Penanaman modal asing langsung, penanaman modal langsung dalam negeri, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia Rumalutur et al., (2022). Pengaruh investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Pangarkar et al. (2011). FDI secara substansial meningkatkan proses re-spesialisasi ekonomi nasional di seluruh dunia dan juga pertumbuhan FDI menyebabkan peningkatan jumlah produksi Pelinescu and Dulescu (2009). Bahwa FDI adalah alat transfer teknologi, memberikan kontribusi yang relatif lebih besar terhadap pertumbuhan daripada investasi dalam negeri Borensztein et al., (1998). Bantuan luar negeri berkontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, seperti tabungan domestik dan aliran masuk modal swasta Zhuang and Dowling, (2003). Hermes and Lensink, (2003) peran perkembangan sistem keuangan dalam meningkatkan hubungan positif antara FDI dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Amerika Latin dan Asia.

Dampak dari investasi asing langsung di kawasan Eropa Tengah dan Timur masih ambigu, karena terbukti ada dampak positif dan negatifnya Szkorupová, (2014). FDI sendiri memainkan peran ambigu dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Alfaro et al., (2004). Studi Begley (1978) yang menunjukkan bahwa bantuan luar negeri meningkatkan tabungan domestik dari pada pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya untuk beberapa negara Amerika latin saja. Studi statistik terbesar yang dilakukan oleh Gupta dan Islam (1983) menemukan bahwa tabungan domestik jauh lebih penting daripada modal asing. Menyimpulkan bahwa bantuan luar negeri lebih berguna dari pada investasi Kholis, (2012)

PMA tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Hapsari dan Prakoso (2016). Investasi asing langsung berdampak negatif pada ekspansi output dalam jangka panjang Ang (2009). Investasi asing tidak mempercepat pertumbuhan produktivitas di perusahaan domestik Haddad and Harrison (1993). Aliran FDI ke dalam bukanlah saluran transfer teknologi yang signifikan, investasi asing berdampak negatif terhadap produktivitas yang dimiliki dalam negeri Aitken and Harrison (1999). Hasil konsisten dengan temuan dari studi satu negara

bahwa efek limpahan teknologi positif untuk negara-negara maju tetapi tidak signifikan di negara-negara kurang berkembang Xu (2000), dalam beberapa kelompok negara dan periode waktu yang berbeda, menghasilkan hubungan negatif antara arus bantuan masuk dengan proporsi tabungan domestik terhadap GDP.

## 2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan penelitian yang sedang berjalan:

*Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya*

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ma'ruf dan Wihastuti (2008)	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB</li> <li>• PDRB Tahun Sebelumnya</li> <li>• Pengeluaran Pemerintah</li> <li>• Defisit Anggaran Pemerintah</li> <li>• Derajat Keterbukaan Perekonomian Rill</li> <li>• Inflasi</li> <li>• Populasi Penduduk</li> <li>• Binari SDA</li> <li>• Binari Lokasi</li> <li>• Dummy Desentralisasi</li> </ul>	Alat Analisis unit root test	pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara agregat
2	Sari, Sychalad	Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>	Ordinary Least Square	Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara

	, dan Majid (2016)	Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi</li> <li>• Pengeluaran pemerintah</li> </ul>	(OLS)	simultan dan parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
3	Rizky, Agustin, dan Mukhlis (2022)	Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• PMA</li> <li>• PMDN</li> <li>• Belanja Modal</li> </ul>	Analisis Regresi Data Panel	Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi Di Indonesia.
4	Rinova dan Dewi (2021)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Ketergantungan Daerah</li> <li>• Rasio Efektivitas PAD</li> </ul>	Analisis Regresi Linier Berganda	Bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio ketergantungan regional tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Rasio efektivitas LGR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
5	Merlin Anggraeni (2015)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Pengeluaran Pendidikan</li> <li>• Pengeluaran Kesehatan</li> <li>• Pengeluaran Pertanian</li> </ul>	ECM (Error Correction Model)	pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
6	Izzah (2015)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Riau Tahun 1994-2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• IPM</li> <li>• Inflasi</li> </ul>	regresi	Adanya pengaruh positif variabel IPM terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Menunjukkan adanya pengaruh negatif variabel inflasi terhadap variabel pertumbuhan ekonomi
7	Sumaryani	Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan</li> <li>• Inflasi</li> </ul>	Error Correction	penerimaan pajak, Inflasi, Pengangguran, pendidikan juga

	(2019)	Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangguran</li> <li>• Pendidikan</li> </ul>	Model (ECM)	memiliki pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia
8	Abustan dan Mahyuddin (2009)	Analisis Vector Auto Regressive (Var) Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Belanja Publik</li> </ul>	Vector Auto Regression (VAR) analisis	secara statistik signifikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) mempengaruhi pengeluaran publik (APBD), namun tidak sebaliknya. Sedangkan untuk keperluan prediksi APBD
9	Lubis (2012)	Analisis Hubungan Antara Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Inflasi</li> </ul>	Error Correction Model (ECM)	Korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif sebesar 4,3%.
10.	Jamil dan Santosa (2017)	Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Pengangguran</li> <li>• Kemiskinan</li> <li>• Belanja pendidikan</li> <li>• Belanja kesehatan</li> <li>• Penerimaan pajak</li> <li>• Angkatan kerja</li> <li>• Laju populasi</li> <li>• Share sektor pertanian</li> </ul>	Metode 3SLS.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari belanja kesehatan di Era Orde Baru dan belanja pendidikan di Era Reformasi. Sementara itu, penurunan pengangguran berasal dari belanja infrastruktur di Era Orde Baru.
11	Adriansyah (2014)	Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan PDB</li> <li>• Penerimaan Pajak</li> <li>• Insentif Pajak</li> </ul>	Non eksperimental pendekatan deskriptif, model matematika	Pertumbuhan penerimaan pajak lebih lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB

12	Saragih (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Penerimaan Pajak</li> <li>• Reformasi Perpajakan</li> </ul>	regresi data panel dengan software Stata	penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
13	Solikin (2018)	Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan Perekonomi</li> <li>• Pengeluaran Pemerintah</li> </ul>	metode empiris, metode pengujian hubungan kausal, hasil pengujian, serta argumentasi signifikans	Hasil tinjauan atas empat puluh artikel yang mencakup tujuh puluh dua negara menunjukkan bahwa temuan penelitian beragam, baik yang mendukung Hukum Wagner, Hipotesis Keynes, keduanya, atau tidak mendukung keduanya.
14	Maulid, Bawono, dan Sudibyo (2021)	The Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic growth</li> <li>• Personnel expenditur</li> <li>• Material expenditure</li> <li>• Capital Expenditure</li> <li>• Interest Payment</li> <li>• Subsidies</li> <li>• Social Expenditure</li> </ul>	The hypothesis test uses the multiple linear regression method with SPSS 26	belanja pemerintah menunjukkan bahwa komponen belanja pemerintah pusat yang meliputi belanja pegawai, barang, modal, pembayaran bunga, subsidi dan belanja sosial berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel belanja pegawai dan belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat pengaruh negatif signifikan hubungan antara variabel belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi
15	Maulid, Bawono, dan Sudibyo (2022)	Analysis of Causality among Tax Revenue, State Expenditure, Inflation, and Economic Growth in Indonesia between 1973 and 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic growth</li> <li>• Tax Revenue</li> <li>• State Expinditure</li> <li>• inflation</li> </ul>	VECM, granger causality test	hubungan antara penerimaan pajak dan pengeluaran negara serta penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. belanja negara telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak. peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pemerintah

					melakukan pengeluaran negara, baik dalam pembangunan maupun kegiatan lainnya, untuk meningkatkan perekonomian rakyat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. inflasi menunjukkan bahwa variabel ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan tidak berlaku sebaliknya, namun variabel ini berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, belanja negara dan pertumbuhan ekonomi
16	Borensztei , Gregorio, dan Lee (1998)	How does foreign direct investment affect economic growth?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic Growth</li> <li>• FDI</li> </ul>	regression framework	FDI merupakan sarana penting untuk transfer teknologi, memberikan kontribusi yang relatif lebih besar terhadap pertumbuhan dibandingkan investasi dalam negeri. Dengan demikian, FDI berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hanya ketika kemampuan penyerapan yang memadai dari teknologi maju tersedia dinegara yang menerima investasi.
17	Feridun dan Sissoko (2011)	Impact of FDI on Economic Development: A Causality Analysis for Singapore, 1976 – 2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GDP</li> <li>• FDI</li> </ul>	of Granger causality and vector auto regression (VAR)	Bukti menunjukkan bahwa ada hubungan sebab akibat Granger searah dari investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi
18	Ogeh, Harvey, dan Hagan, (2008)	Fiscal policy, private investment and economic growth: the case of Ghana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GDP</li> <li>• Tax</li> <li>• Invesment</li> </ul>	Cointegration and an error-correction models are used	perubahan belanja berulang pemerintah, belanja modal pemerintah saat ini dan pajak perdagangan internasional signifikan untuk pertumbuhan.
19	Hong (2014)	Does and How does FDI Promote the Economic Growth? Evidence from	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic Growth</li> <li>• FDI</li> </ul>	econometric model	FDI memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Selain itu, skala ekonomi, modal manusia, tingkat infrastruktur, tingkat upah, perbedaan regional berinteraksi

		Dynamic Panel Data of Prefecture City in China			secara aktif dengan FDI dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Tiongkok
20	Atems (2015)	Another Look at Tax Policy and State Economic Growth: The Long-Run and Short-Run of It	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic Growth</li> <li>• Tax</li> </ul>	Model Durbin spasial	menunjukkan bahwa pajak memiliki efek limpahan spasial jangka pendek dan jangka panjang yang negatif pada pertumbuhan negara
21	Ahmad, Ali, dan Khan (2020)	The Impact of Taxation on Economic Growth Using ARDL Approach: A Case Study of Pakistan Sareer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic Growth</li> <li>• Tax</li> </ul>	Stationarity of the data checked through Augmented Dickey Fuller (ADF) test and then applied Autoregressive Distributed Lag (ARDL)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan nilai tukar berpengaruh negatif namun signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. harus fokus pada kebijakan fiskal yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
22	Yi dan Suyono (2014)	The Relationship between Tax Revenue and Economic Growth of Hebei Province Based on The Tax Multiplier Effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic Growth</li> <li>• Tax Revenue</li> </ul>	complex mathematical and statistical modeling	bahwa dampak negatif dari peningkatan pendapatan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemotongan pajak akan menciptakan efek yang lebih positif di Provinsi Hebei. pajak dari sistem perpajakan saat ini harus ditinjau dan dilaksanakan.
23	Kalaš, Mirović, dan Milenković (2018)	The Relationship Between Taxes And Economic Growth: Evidence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic Growth</li> <li>• Taxes</li> </ul>	used a multiple regression	pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan iuran jaminan sosial berdampak positif terhadap produk domestik bruto, sedangkan cukai berpengaruh negatif terhadap produk domestik bruto.

24	Dackehag dan Hansson (2012)	Taxation of income and economic growth: An empirical analysis of 25 rich OECD countries	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic Growth</li> <li>• Taxation of Income</li> </ul>	using fixed effects regression,	pajak pendapatan perusahaan dan pribadi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
25	Pratama dan Widyastuti (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Inflasi</li> <li>• Penerimaan Pajak</li> </ul>	Regresi Linear Berganda dengan SPSS 25	bahwa penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh namun kearah negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
26	Putri, Amar, dan Aimon (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Ketimpangan Pendapatan</li> <li>• Derajat Otonomi Fiskal Daerah</li> <li>• Rasio Pajak</li> <li>• Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Investasi</li> <li>• IPM</li> </ul>	Simultananalisis model persamaan dengan metode Indirect Least Squared (ILS) Common Effect.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) derajat otonomi fiskal, rasio pajak dan investasiberpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (2) variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh ketimpangan pendapatan di Indonesia secara signifikan. Berdasarkan hasil pembahasan, maka kebijakan yang dapat disarankan adalah
27	Umaru dan Zubairu (2012)	Effect of Inflation on the Growth and Development of the Nigerian Economy (An Empirical Analysis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GDP</li> <li>• Inflation</li> </ul>	Augmented Dickey-Fuller technique in testing the unit root property of the series and Granger causality test of causation	inflasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan tingkat output serta evolusi produktivitas faktor total. Oleh karena itu, kinerja ekonomi yang baik dalam hal pertumbuhan per kapita dapat dikaitkan dengan tingkat inflasi di negara tersebut. Inflasi hanya dapat ditekan seminimal mungkin dengan meningkatkan tingkat output (PDB)

28	Takumah dan iyke (2017)	The links between economic growth and tax revenue in Ghana: an empirical investigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tax revenue</li> <li>• Economic Growth</li> </ul>	causality	Temuan ini sejalan dengan temuan yang ada bahwa perpajakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Implikasinya terhadap kebijakan adalah ruang lingkup pajak negara harus diperluas untuk meningkatkan penerimaan dari perpajakan
29	Pelinescu dan Radulescu (2009)	The Impact Of Foreign Direct Investment On The Economic Growth And Countries' Export Potential	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FDI</li> <li>• Economic Growth</li> </ul>	EViews X12 programs. ADF Tests.	pengaruh langsung FDI masih rendah, tetapi pengaruh tidak langsung melalui peningkatan produktivitas dan daya saing lebih besar dan signifikan dalam perekonomian Rumania.
30	Al-Faris (2002)	Public expenditure and economic growth in the Gulf Cooperation Council countries	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Public Expenditure</li> <li>• Economic Growth</li> </ul>	The standard Granger causality test analyses bivariate weakly stationary	Bukti empiris tidak mendukung hipotesis pengeluaran publik yang menyebabkan pendapatan nasional seperti yang dikemukakan oleh teori Keynesian
31	Eggoh dan Khan (2014)	On the Nonlinear Relationship between Inflation and Economic Growth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inflation</li> <li>• Economic Growth</li> </ul>	PSTR model specification	Hasil empiris kami memperkuat kedua pandangan dan memvalidasi fakta bahwa nonlinier inflasi-pertumbuhan sensitif terhadap tingkat perkembangan keuangan, akumulasi modal, keterbukaan perdagangan, dan pengeluaran pemerintah suatu negara. <b>non</b> linier merupakan suatu sistem yang sifatnya tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit diprediksi
32	Daniel Landau (2013)	Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Government Expenditure</li> <li>• Economic Growth</li> </ul>	regresi	Hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih lemah untuk periode waktu yang lebih singkat

## **2.8 Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1. Penerimaan Negara Sektor Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pendapatan pajak adalah sumber pendapatan utama dan dasar kebijakan ekonomi pemerintah, mengoptimalkan pajak sangat penting sebagai alat mengatur roda ekonomi di Indonesia dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsep Teori Keynes kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai berfokus pada kebijakan pemerintah yang aktif melalui intervensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal penerimaan pajak dan penurunan tarif pajak. Menurut Teori Keynes penerimaan pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ketika melakukan konsumsi akan menambah pendapatan pihak lain yang dapat meningkatkan perekonomiannya, dengan bertransaksi menggunakan uangnya sehingga meningkatkan pendapatan orang lain. Jika tarif pajak dinaikan maka daya beli dalam melakukan konsumsi berkurang, sehingga pendapatan dari pajak akan menurun, dimana pajak tersebut salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara. Maka dengan tarif pajak yang rendah masyarakat akan meningkatkan konsumsi. Didalam konsumsi ada pengenaan pajak dari barang atau jasa, dengan begitu pendapatan pajak akan meningkat yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Kesenambungan penerimaan pajak akan menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi baik dalam keadaan resesi sekalipun. Studi empiris tentang hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi juga telah memberikan bukti bahwa berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi oleh banyak peneliti diantaranya Ogeh et al., (2008), Adriansyah (2014), Adkisson and Mohammed (2014), Afuberoh and Emmanuel (2014), Jalata (2014), Stoilova (2017), Takumah and Iyke (2017), Onakoya et al., (2017), Kalaš et al., (2018), Sumaryani (2019), Agunbiade and Idebi (2020), Lesfandra (2021), Saragih (2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1 = Penerimaan negara perpajakan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi**

### **2.8.2. Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Fazzari (1994) kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah sebagai komponen pendorong utama pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dapat meningkatkan produktifitas sehingga menghasilkan output mencapai pertumbuhan ekonomi. Belanja negara memang menjadi salah satu alat kebijakan yang penting dan ideal digunakan oleh pemerintah dalam upaya

menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian. Wagner (1883) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin bertambah, maka peran pemerintah juga meningkat dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Secara teoritis, pengeluaran pemerintah berkomitmen untuk dialokasikan pada kesejahteraan akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita; peningkatan ini didefinisikan oleh produktifitas yang lebih besar, yang memberikan *output* yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran belanja sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi beberapa peneliti Wihastuti (2008), Devarajan et al., (1996), Gupta et al., (1998), Fazzari (1994), Suparno (2014), Agustina et al., (2016), Safira et al., (2019) Sari et al., (2016), Anggraeni (2015), Maulid et al., (2021), Nasution et al., (2021), Irandoust (2019), Abdulrasheed (2017), Danladi et al., (2015), Jamil dan Santosa (2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2= Pengeluaran belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi**

### **2.8.3. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Inflasi tinggi menunjukkan volatilitas ekonomi, yang mengakibatkan kenaikan harga barang-jasa secara umum dan sering, yang memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Teori Keynes, inflasi disebabkan oleh permintaan barang-jasa yang berlebihan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan secara berlebihan, permintaan meningkat, pasokan tetap, yang terjadi adalah harga naik, dan pemerintah dapat membeli barang dan jasa dengan mencetak uang. Keynesian membenarkan keterlibatan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik untuk mencapai stabilitas harga. Kebijakan moneter berkaitan dengan kendali pemerintah atas pasokan uang; terlalu sedikit uang dapat menghambat aktivitas ekonomi, sementara terlalu banyak uang dalam sirkulasi menciptakan inflasi. Inflasi biasanya ditandai dengan kelimpahan permintaan untuk barang-jasa dan kekurangan barang-jasa di masyarakat. Keadaan yang menggambarkan terjadinya inflasi adalah tingginya harga barang di pasar barang dan jasa dalam waktu yang lama. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Ardani et al.,(2010), Chowdhury and Mallik (2001), Mubarik (2005), Umaru dan Zubairu (2012), Lubis (2012), De Gregorio (1992), Fischer (1993), Quartey (2010), Kasidi (2011),

Izzah (2015), Herman (2017), Pratama dan Widyastuti (2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3 = Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi**

**2.8.4. Investasi Asing Langsung (FDI) dan Pertumbuhan Ekonomi**

Harrod (1939) Domar (1947) model pertumbuhan ekonomi pengembangan dari teori Keynes yang menekankan pentingnya investasi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod (1939) Domar (1947) adalah pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi, sebagai pengeluaran yang akan meningkatkan kemampuan ekonomi untuk menghasilkan *output*, serta biaya yang akan menambah permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan. Investasi diperlukan untuk meningkatkan *output* nasional. Aktivitas investasi ini akan mendorong tingkat *output* optimal dan berkontribusi kedepannya. Ada literatur teoritis dan empiris hubungan antara investasi asing langsung (FDI) dan pertumbuhan. Dari berbagai penelitian diperoleh kesimpulan peranan investasi berkontribusi positif dalam menentukan pertumbuhan ekonomi menurut Dowling and kitchen (1988), Brecher dan Abbas (1972), Islam (1978), Jacoby (1966), Kruege (1978), Begley (1978), Gupta dan Islam (1983), Putri et al., (2015), Borensztein et al., (1998), Le and Suruga, (2005), Nair-Reichert and Weinhold, (2001), Hong (2014), Chakraborty and Basu (2002), Pelinescu and Dulescu (2009), Rumlatur et al., (2022), Szkorupová (2014), Pangarkar et al., (2011). Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H4 = Investasi asing langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi**

**2.9 Kerangka Penelitian**

Sistem pendapatan yang berfungsi dengan baik dan komprehensif dianggap sebagai prasyarat yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor pajak diperkirakan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sektor pajak adalah sektor pendapatan utama yang berkontribusi terhadap pembangunan negara. Di sektor pajak, variabel yang dipilih sebagai proksi didasarkan pada kegiatan atau kegiatan utama memperoleh pendapatan negara, yaitu pembayaran pajak dari publik dalam bentuk dana.

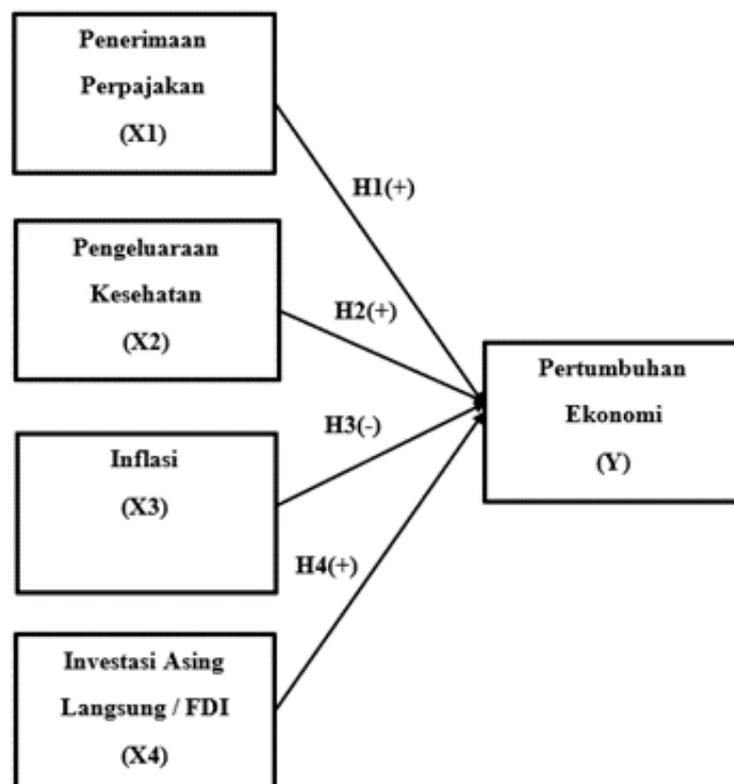
Pengeluaran kesehatan pemerintah adalah salah satu *human capital* yang paling penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Ini karena peningkatan produktivitas membutuhkan kesehatan yang lebih baik. Meningkatkan kesehatan seseorang dapat menyebabkan

peningkatan partisipasi tenaga kerja, meningkatkan kesehatan seseorang bisa menyebabkan peningkatan tingkat pendidikan seseorang, yang kemudian akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi keduanya menarik untuk dilihat. Terlalu sedikit inflasi, bahkan pada tingkat deflasi, dapat menghambat kemajuan ekonomi, sementara terlalu banyak inflasi akan menyebabkan daya beli orang berkurang, mengakibatkan roda ekonomi tidak berputar.

Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal atau investasi memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan modal akan memajukan produksi barang-jasa. Modal atau investasi diperlukan untuk ekonomi negara berkembang dari waktu ke waktu. Pemerintah mempromosikan skenario dan kondisi investasi langsung asing, dengan pembentukan modal tetap, FDI meningkatkan stok kekayaan, yang mendorong pertumbuhan di negara penerima.

Berdasarkan kajian teori yang telah di paparkan diatas, maka dapat di gambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengkonfirmasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih terdapat gap dari hasil penelitian terdahulu atas pengaruh empat variabel yang ditentukan. Peneliti tertarik mengkaji kembali untuk memperoleh bukti empiris. Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah yang diberlakukan apakah dilaksanakan sesuai ketentuan. Populasi dan sampel penelitian ini sekaligus dijadikan sampel yaitu Negara Indonesia tahun 1990 sampai dengan 2021. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Teknik pemilihan sampel menggunakan *judgement sampling* karena sampel yang akan digunakan peneliti mempertimbangkan adanya kelengkapan data yang tersedia yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian. Penelitian ini pada awalnya menggunakan tahun penelitian dari tahun 1970-2021. Sepanjang penelitian berjalan, ketika proses mengumpulkan data peneliti terkendala data tidak lengkap (ketersediaan dan akses data) terutama pada variabel pengeluaran belanja sektor kesehatan hanya tersedia dari tahun 1990, dan variabel penerimaan perpajakan tersedia dari tahun 1972-2020 untuk data rasio (%) dan direntang tersebut banyak data yang kosong, sehingga peneliti menetapkan tahun penelitian antara tahun 1990–2021, direntang tahun tersebut data yang lengkap.

#### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif menjelaskan pengaruh Penerimaan Negara sektor Perpajakan, Pengeluaran Belanja sektor Kesehatan, Inflasi, dan Investasi Asing Langsung (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan sampel data skunder time series dari tahun 1990-2021 di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari laporan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri yang telah di

publikasikan melalui LKPP, World Bank, Jurnal, Artikel dan media online yang relevan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data skunder yang diambil berdasarkan data laporan, jurnal, dan media online yang relevan yang diunduh melalui situs resmi website masing-masing. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen yang diteliti.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

#### 3.4.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menghasilkan output yang lebih banyak. Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik, PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB ini merupakan total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah. Pada penelitian ini untuk menghitung produk domestik bruto (PDB) dikonsepsi metode pengeluaran menurut Badan Pusat Statistik diformulasikan sebagai berikut:

$$PDB = C + I + G + (X-M)$$

PDB = Produk Domestik Bruto

C = konsumsi rumah tangga nasional

I = Investasi

G = konsumsi negara, dan

XM = Ekspor – Impor

Konsumsi atau C yang terdapat dalam rumus tersebut adalah konsumsi barang dan jasa yang ada dalam negara. Peningkatan nilai konsumsi bisa diartikan bahwa adanya kemauan yang tinggi pada masyarakat untuk membelanjakan uang mereka. Sebaliknya, rendahnya angka konsumsi bisa diindikasikan bahwa negara tersebut sedang mengalami kondisi yang tidak pasti sehingga mampu menahan masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Investasi atau yang

dilambangkan dengan huruf I bisa berupa investasi pengeluaran dana modal untuk mengembangkan bisnis. Sehingga, penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa terjadi. Belanja negara atau G berarti adanya pengadaan barang jasa peralatan penunjang operasional pemerintah, pembangunan infrastruktur, sampai pembayaran gaji aparat sipil negara. Belanja yang dilakukan oleh negara bersangkutan akan mempengaruhi nilai PDB. Nilai PDB juga dipengaruhi dengan perdagangan internasional.  $X$  dan  $M$  dari nilai total ekspor yang dikurangi dengan nilai impor. Data pertumbuhan ekonomi menggunakan data skunder yaitu data indeks Pertumbuhan Ekonomi dengan indikatornya GDP persentase tahunan pertumbuhan GDP.

### 3.4.2 Variabel Independen

Penelitian ini memiliki empat (4) variabel independen yaitu penerimaan negara sektor perpajakan/ TAX ( $X_1$ ), pengeluaran belanja kesehatan/ Health ( $X_2$ ), inflasi ( $X_3$ ), dan investasi asing langsung/ FDI ( $X_4$ ).

#### 3.4.2.1. Penerimaan Negara Sektor Perpajakan

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Data penerimaan negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi penerimaan tahun 1990 sampai dengan 2021 berasal dari LKPP APBN. Penerimaan negara sektor perpajakan penelitian ini dituliskan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Perpajakan} = \text{Pph} + \text{Ppn} + \text{PpnBM} + \text{PBB} + \text{Pendapatan Cukai} + \text{pajak lainnya} + \text{pajak perdagangan internasional (beamasuk, beakeluar)}.$$

#### 3.4.2.2. Pengeluaran Belanja Sektor Kesehatan

Pembiayaan kesehatan adalah dana yang harus disediakan pemerintah untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga dan masyarakat. Alokasi Anggaran belanja sektor kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*) yang sudah diatur dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 pasal 171. Pada penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Anggaran Kesehatan} = \frac{\text{Anggaran Kesehatan}}{\text{Total Belanja Negara}} \times 100\%$$

### 3.4.2.3. Inflasi

Inflasi secara konseptual menurut Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan dalam kurun waktu yang terus menerus. Kenaikan harga ini disebabkan oleh adanya permintaan masyarakat dan dorongan biaya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tergerusnya daya beli masyarakat. Data inflasi merupakan persentase tahunan dari indeks harga konsumen. BPS menghitung inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks pengeluaran. IHK sendiri meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman atau tembakau. Komponen IHK lainnya dalam perhitungan inflasi adalah pengeluaran sandang, perumahan, Kesehatan, Pendidikan dan olahraga serta transportasi dan juga komunikasi. Pada penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Inflasi (I)} = \text{IHK Tahun } n$$

### 3.4.2.4. Investasi Asing Langsung

Investasi Langsung (Direct Investment) Adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat serta menghasilkan dampak berganda yang besar bagi masyarakat luas. Sektor prioritas untuk Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*/FDI) yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 adalah infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri, serta ekonomi digital. Foreign Direct Investment (FDI) terdiri dari jumlah modal ekuitas dengan melepaskan reinvestasi pendapatan, modal jangka panjang lainnya, dan modal jangka pendek. Dengan kata lain jumlah arus masuk investasi baru dikurangi disinvestasi dari investor asing dibagi dengan GDP (World Bank). Pada penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{FDI} = \frac{\text{Investasi Masuk} - \text{Reinvestasi}}{\text{GDP}} \times 100\%$$

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis statistik diperlukan untuk menguji hipotesis penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian yang ada. Analisis penelitian menggunakan software Eviews versi 10.

#### 3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan aktivitas pengumpulan, penataan, peringkasan dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pengguna data. Statistik deskriptif hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti tanpa maksud untuk melakukan generalisasi sampel.

Ghozali (2018) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis. Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat didalam penelitian ini. Statistik deskriptif juga menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

#### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik perlu dilakukan agar model regresi tidak bias. Uji asumsi klasik (Gauss-Markov) merupakan syarat yang harus dilakukan pada setiap uji regresi linear *ordinary least square* (OLS). Jika asumsi dipenuhi, maka parameter yang diperoleh dengan OLS adalah bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) adanya hubungan sempurna, linier dan pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Ariefianto, 2012). Di dalam analisis regresi menggunakan aplikasi eviews, dapat melakukan berbagai jenis uji asumsi klasik yang menjadi syarat-syarat tersebut. Asumsi klasik yang harus dilakukan pada penelitian analisis regresi OLS: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linearitas regresi (Ajija et al., 2010).

### 3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Dalam Eviews, uji normalitas dapat dilakukan dengan uji *Jerque-Bera* (*JB-test*). Untuk mengambil keputusan pada *Jerque-Bera* dan *Probability* penelitian Ekonomi dan Bisnis pada umumnya menggunakan signifikansi  $\alpha=0,05$  (5%), jika *probability*  $< \alpha$ , maka data tidak berdistribusi normal. Jika *probability*  $> \alpha$ , maka data berdistribusi normal. (Ajija et al., 2010) Uji normalitas hanya dilakukan apabila penelitian memiliki jumlah observasi kurang dari 30 untuk mengetahui apakah error term mendekati data yang berdistribusi normal.

### 3.5.2.2. Uji Multikoleniaritas

Model regresi yang baik tidak terjadi multikoleniaritas. Uji multikoleniaritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Multikoleniaritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas  $> 0,8$  maka terjadi multikoleniaritas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas  $< 0,8$  maka tidak terjadi multikoleniaritas (Ajija et al., 2010). Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikoleniaritas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018): Jika nilai VIF  $< 10$  maka model regresi dikatakan tidak mengalami masalah multikoleniaritas.

### 3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan asumsi pada model regresi. Penyimpangan ini disebabkan oleh adanya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Syarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya penyimpangan heteroskedastisitas. Biasanya uji yang sering digunakan adalah Uji *Breusch-Pagan-Godfrey*, *White*, dan *Glejser* (Ariefianto, 2012). Hasil yang diperhatikan dilihat dari nilai F dan  $\text{Obs} \cdot \text{R-Squared Prob Chi-Square} > \alpha=0,05$  (5%) tidak ada gejala heteroskedastisitas.

### 3.5.3.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi merupakan uji untuk mengetahui berapa besar pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh regresi. Nilai koefisien

determinasi adalah antara 0 dan 1, bila  $R^2 = 0$  berarti tidak ada hubungan yang sempurna atau menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan apabila  $R^2 = 1$  maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Semakin mendekati 1 semakin baik (Ajija et al., 2010).

#### 3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan salah satu pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui penyimpangan asumsi, yaitu adanya korelasi yang disebabkan oleh residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain di dalam model regresi. Autokorelasi menunjukkan korelasi diantara rangkaian sampel observasi yang sering ditemukan pada data runtun waktu atau *time series* (Ajija et al., 2010). Syarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW): Jika  $DW < -2$ , berarti terjadi autokorelasi positif; Jika  $-2 \leq DW \leq +2$ , berarti tidak terjadi autokorelasi; Jika  $DW > +2$ , berarti ada autokorelasi negatif. Selain menggunakan uji Durbin Watson, pengujian autokorelasi juga dapat dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  $Obs \cdot R\text{-squared Prob Chi-Square} > \text{Alpha} (0,05)$ .

#### 3.5.3 Uji Hipotesis Regresi Linear

Model regresi linear memiliki asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi model yang baik yang dikenal dengan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Setelah melakukan uji asumsi-asumsi yang telah dipenuhi, melakukan estimasi persamaan linear dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) (Ajija et al., 2010). Untuk memperoleh model regresi maka menggunakan parameter dengan metode OLS. Dalam penelitian ini analisis linear berganda digunakan untuk menguji Pengaruh Penerimaan Negara Sektor Perpajakan (X1), Pengeluaran Belanja Kesehatan (X2), Inflasi (X3), FDI (X4), terhadap Pertumbuhan Ekonomi (X4). Adapun model regresi linier berganda berdasarkan penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Tax} + \beta_2 \text{Health} + \beta_3 \text{Inflasi} + \beta_4 \text{FDI} + e$$

Y = Pertumbuhan Ekonomi

$\alpha$  = Konstanta

e = *Error*

Tax	= Penerimaan negara sektor perpajakan
Health	= Pengeluaran belanja kesehatan
Inflasi	= Inflasi
FDI	= Investasi asing langsung
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi

Terdapat 3 uji yang dilakukan dalam melakukan uji hipotesis sebagai berikut:

### 3.5.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama (Simultan) terhadap variabel terikat. Dalam EViews, *output* uji F dapat dilihat dari F-statistic dan/atau Prob(F-statistic). F-statistic disebut pula sebagai  $F_{hitung}$ , sedangkan Prob(F-statistic) disebut pula *p-value* dapat menggunakan keduanya atau salah satunya saja. Jika menggunakan F-statistic, maka harus membandingkan F-statistic tersebut dengan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka Hipotesis diterima. Jika menggunakan *p-value*, maka harus membandingkan *p-value* dengan tingkat signifikansi atau menggunakan  $\alpha = 5\%$ . Pengambilan keputusan *p-value* adalah sebagai berikut: jika  $p\ value < 0,05$  atau  $F\ hitung > F\ tabel$  maka Hipotesis terdukung. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Jika nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha$  maka hasilnya ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  maka model regresi layak (Ajija et al., 2010).

### 3.5.3.3. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)

Uji t merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Selain itu untuk menguji pengaruh tersebut. Jika menggunakan t-Statistic, maka membandingkan t-Statistic tersebut dengan  $t_{tabel}$  (didapatkan pada Tabel t). Pengambilan keputusan t-Statistic adalah sebagai berikut: Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka Hipotesis diterima. Kriteria untuk uji statistik t dengan melihat probability value (sig)-t. Jika menggunakan *p-value*, maka harus membandingkan *p-value* dengan tingkat signifikansi atau  $\alpha=5\%$  (0,05). Pengambilan keputusan *p-value* adalah sebagai berikut: Jika  $p\ value < \alpha=5\%$ , maka Hipotesis diterima artinya bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, Jika  $p\ value > \alpha=5\%$ , maka Hipotesis ditolak artinya bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ajija et al., 2010)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengkonfirmasi gap penelitian terdahulu antar variabel, dan menganalisis pengaruh antara penerimaan negara sektor perpajakan, pengeluaran belanja sektor kesehatan, inflasi, dan investasi asing langsung pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sehingga dapat berkontribusi dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan negara sektor perpajakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, penerimaan negara dari sektor perpajakan yang terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini didukung oleh data penerimaan pajak yang cenderung fluktuatif dan terjadi realisasi penerimaan pajak dibawah penetapan target diawal anggaran sebanyak 12 kali berturut-turut sejak 2008. Data LKPP menunjukkan bahwa realisasi tahun 1990 – 2004, 2006, dan 2008 melebihi dari target yang dianggarkan atau dapat dikatakan over target, namun pada tahun 2005, 2007, 2009 – 2020 realisasi penerimaan di bawah target yang dianggarkan atau dapat dikatakan tidak mencapai target. Penerimaan pajak membantu negara dalam hal mengurangi defisit fiskal, tetapi masih belum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat penerimaan pajak belum memiliki pengaruh yang terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pengeluaran belanja sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, pengeluaran belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengandung makna

bahwa belanja pengeluaran sektor kesehatan selama 32 tahun (1990-2021) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini didukung data berasal dari LKPP bahwa Alokasi anggaran belanja kesehatan yang tergolong rendah dibawah ketentuan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dibawah minimal alokasi anggaran kesehatan 5% dari APBN di luar gaji. Mengacu data BPS jumlah persentase penduduk Indonesia yang memiliki keluhan kesehatan, melakukan pengobatan rawat jalan, rawat inap dan terganggu aktifitasnya pun terus mengalami peningkatan, namun penganggaran kesehatan rata-rata konstan 3% selama 32 tahun. Anggaran kesehatan tersebut digunakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya menurut KPK menemukan adanya kasus yang terjadi pada sektor kesehatan, modus yang digunakan adalah dengan mark-up nilai pembelian peralatan medis 70% terjadi pada pengadaan barang dan jasa, 15% penyalahgunaan wewenang selaku pejabat di lingkungan kesehatan, dan 2% penyalahgunaan profesi. Ada sekitar 8% mis-manajemen, 2% pemerasaan, 1% grativikasi, dan 2% tidak termasuk korupsi (BPKP.go.id)

3. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, inflasi teruji secara negatif signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik atau berlawanan. Berhasil mengkonfirmasi Teori Keynes dengan kebijakan pemerintah yang aktif melakukan intervensi kebijakan moneter bersama dengan Bank Indonesia untuk mengelola perekonomian melalui kestabilan inflasi, suku bunga, nilai tukar, memerangi pengangguran, mengubah kebijakan moneter, atau menempatkan kontrol pada pasokan uang beredar.
4. Investasi asing langsung/FDI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, Investasi asing langsung/FDI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berhasil mengkonfirmasi Teori Harrod (1939) Domar (1947) fungsi dari pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi, untuk meningkatkan output nasional diperlukan investasi yang akan mendorong tingkat produksi ketinggian yang optimum dan memberikan kontribusi pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi.

## **5.2.Implikasi**

### **5.2.1 Implikasi Teoritis**

1. Hasil Penelitian ini dapat digunakan pada pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada *macroaccounting* sektor publik (akuntansi ekonomi nasional). *Macroaccounting* merupakan akuntansi yang diterapkan untuk melayani perekonomian secara nasional dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Penelitian ini menghasilkan bukti penerapan Teori Keynes pada penerimaan perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat terkonfirmasi. Menurut Teori Keynes, penggunaan kebijakan fiskal melalui Intervensi pemerintah melalui pengelolaan perpajakan untuk memenuhi sistem kinerja ekonomi sehingga memaksimalkan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian ini menghasilkan bukti penerapan Wagner pada pengeluaran belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat terkonfirmasi. Menurut Wagner, dengan majunya perekonomian, makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan, apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya sehingga meningkatnya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.
4. Penelitian ini menghasilkan bukti penggunaan Teori Keynes pada inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi terkonfirmasi, sebagai tambahan wawasan dan referensi untuk penelitian kedepan.
5. Penelitian ini menghasilkan bukti penggunaan Teori Harrold-Domar pada investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi terkonfirmasi, sebagai tambahan wawasan dan referensi untuk penelitian kedepan.

### **5.2.2 Implikasi Empiris**

1. Penelitian ini memberikan bukti empiris penerimaan sektor perpajakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini menambah literatur gap empiris bagi penelitian selanjutnya dalam lingkup faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap sektor perpajakan.

2. Penelitian ini memberikan bukti empiris pengeluaran belanja sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini menambah literatur gap empiris bagi penelitian selanjutnya dalam lingkup faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap pengeluaran belanja fungsi kesehatan.
3. Penelitian ini memberikan bukti empiris inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini menambah literatur gap empiris bagi penelitian selanjutnya dalam lingkup faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap inflasi.
4. Penelitian ini memberikan bukti empiris investasi asing langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini menambah literatur gap empiris bagi penelitian selanjutnya dalam lingkup faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap investasi asing langsung.

### 5.2.3 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan beberapa temuan bagi pengembangan teori, empiris, dan praktis:

1. Hasil amatan penelitian ini menemukan realisasi penerimaan perpajakan selama 12 tahun berturut-turut terjadi selisih antara realisasi lebih rendah dari target penerimaan pajak yang ditetapkan pada awal anggaran. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan. Pemerintah diharapkan dapat menggali potensi perpajakan dengan melakukan pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal, merealisasikan pemungutan pajak dari sektor *e-commerce* untuk memaksimalkan perolehan realisasi penerimaan pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Pemerintah memerlukan evaluasi pada perencanaan dalam penetapan target penerimaan perpajakan agar realisasi penerimaan perpajakan dapat tercapai (*over target*) dan tidak terjadi lagi realisasi pendapatan pajak dibawah target yang dianggarkan apada awal tahun. Pemerintah perlu melakukan pengendalian dan pengawasan penyebab terjadinya realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan pada penerimaan perpajakan.
2. Hasil amatan penelitian ini menemukan bahwa belanja sektor kesehatan selama 32 tahun masih rendah dibawah ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan pengalokasian minimal 5% dari APBN di luar gaji. Penganggaran sektor kesehatan selama 32 tahun rata-rata sebesar 3%. Hasil ini dapat memberikan implikasi pada pemerintah agar melakukan penambahan alokasi anggaran kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang maksimal, dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Hasil Penelitian ini dapat memberikan implikasi untuk menentukan kebijakan pemerintah atas inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berkelanjutan mengendalikan kebijakan moneter. Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia, memprediksi kestabilan pada pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang dengan mengontrol kestabilan inflasi, suku bunga, nilai tukar, memerangi pengangguran, mengubah kebijakan moneter, atau menempatkan kontrol pada pasokan uang beredar.
4. Hasil Penelitian ini dapat memberikan implikasi untuk menentukan kebijakan pemerintah atas FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memperbesar lapangan pekerjaan melalui FDI diawali dengan memudahkan regulasi pelayanan perizinan, dan meningkatkan kesejahteraan SDM sebagai pelaku ekonomi dengan memperbaiki mutu pelayanan serta fasilitas publik. Pemerintah Indonesia terus menjaga keamanan kesehatan iklim perekonomian dan investasi yang baik. Pemerintah Indonesia terus membuktikan kestabilan politik sejak terjadi reformasi politik. Pemerintah Indonesia memiliki peran aktif dalam membangun hubungan bilateral maupun internasional.

### **5.3.Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan memperoleh data berbentuk rasio pada variabel penerimaan pajak. Terdapat data rasio yang tidak lengkap, sehingga menggunakan data berbentuk absolut. Peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya agar dapat menemukan data penerimaan pajak menggunakan data berbentuk rasio.
2. Kesulitan dalam memperoleh data dari tahun 1990 hingga ke bawah pada data sektor kesehatan. Kurangnya data dikarenakan terbatasnya ketersediaan dan akses data sehingga ditetapkan menggunakan 32 tahun penelitian. Peneliti menyarankan untuk

penelitian berikutnya agar dapat menemukan data sektor kesehatan pada tahun sebelumnya yang lebih lengkap.

3. Menggunakan unit analisis hanya pada negara Indonesia saja sehingga skalanya kecil, mungkin kurang dapat diandalkan karena jumlah data yang rendah. Diperlukan ukuran sampel yang besar untuk analisis yang lebih akurat, karena uji statistik biasanya membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar untuk memastikan representasi yang adil. Sampel tersebut tidak secara akurat mewakili keseluruhan yang relevan. Akibatnya, penelitian mengalami bias pengambilan sampel. Peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya agar dapat menggunakan unit analisis yang lebih luas seperti menggunakan negara ASEAN atau negara yang tergabung dalam G-20.
4. Penelitian ini hanya berfokus menggunakan empat variabel independen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain variabel penerimaan negara sektor pajak, pengeluaran belanja sektor kesehatan, inflasi, dan investasi asing langsung. Peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya agar dapat menggunakan faktor-faktor lain diluar fokus variabel penelitian ini yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dapat dijadikan variabel penelitian berikutnya seperti: sumber daya manusia dilihat dari tingkat pengangguran, sumber daya alam diketahui dari nilai ekspor barang mentah, ilmu pengetahuan pemanfaatan teknologi, tingkat suku bunga, faktor sosial dan budaya, dan faktor politik dan administratif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrasheed, B. (2017). Causality between Government Expenditure and Government Revenue in Nigeria. *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, 4(1), 91–98.
- Abustan, A., & Mahyuddin, M. (2009). Analisis Vector Auto Regressive (Var) Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 1.
- Adkisson, R. V., & Mohammed, M. (2014). Tax structure and state economic growth during the great recession. *Social Science Journal*, 51(1), 79–89.  
<https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.009>
- Adriansyah, B. G. (2014). Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur. In *Kajian Ekonomi dan Keuangan* (Vol. 18, Issue 1, pp. 69–84). <https://doi.org/10.31685/kek.v18i1.151>
- Afafun Nisa, A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 2011–2015.
- Afuberoh, D., & Emmanuel, O. (2014). The Impact of Taxation on Revenue Generation in Nigeria: A Study of Federal Capital Territory and Selected States. *International Journal of Public Administration and Management Research (IJPAMR)*, 2(2), 22–47.  
<http://www.rcmss.com>.
- Agunbiade, O., & Idebi, A. A. (2020). Tax Revenue and Economic Growth Nexus: Empirical Evidence From the Nigerian Economy. *European Journal of Economic and Financial Research*, 4(2), 18–41. <https://doi.org/10.46827/ejefr.v4i2.832>
- Agustina, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2016). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap produk domestik regional bruto serta indeks pembangunan manusia di kalimantan timur. *Inovasi*, 12(2), 192–217.
- Ahmad, S., Ali, M., & Khan, S. (2020). The Impact of Taxation on Economic Growth Using ARDL Approach: A Case Study of Pakistan. *Journal of Finance & Economics Research*, 5(2), 89–95. <https://doi.org/10.20547/jfer2005202>

- Aitken, B. J., & Harrison, A. E. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. *American Economic Review*, 89(3), 605–618.  
<https://doi.org/10.1257/aer.89.3.605>
- Ajija, Shochrul Rohmatul, Wulan Sari, D., Setianto, R., & Primanthi, M. (2010). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*.
- Al-Faris, A. F. (2002). Public expenditure and economic growth in the Gulf Cooperation Council countries. *Applied Economics*, 34(9), 1187–1193.  
<https://doi.org/10.1080/00036840110090206>
- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: The role of local financial markets. *Journal of International Economics*, 64(1), 89–112.  
[https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(03\)00081-3](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(03)00081-3)
- Ang, J. B. (2009). Foreign direct investment and its impact on the Thai economy: The role of financial development. *Journal of Economics and Finance*, 33(3), 316–323.  
<https://doi.org/10.1007/s12197-008-9042-6>
- Anggraeni Merlin. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015 Healty and Agriculture on Economic Growth Perkembangan PDB Indonesia Tahun 1995-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonom*, 6(5), 499–509.  
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ekonomi/article/view/7207/6859>
- Aprilia, E., Gamayuni, R., & Suhendro, S. (2022). *E-government as Good Governance in Building Post-Covid 19 Technological Innovations*. 19. <https://doi.org/10.4108/eai.7-10-2021.2316234>
- Ardani, R. P. P. P., Setiawan, J. S., & Sari, R. P. P. P. (n.d.). *Analisis Analisis Pengaruh Pengaruh Pengaruh Penerimaan Penerimaan Penerimaan Pajak, Belanja Belanja Belanja Pembangunan/Modal Pembangunan/Modal Pembangunan/Modal dan Tingkat Tingkat Inflasi Inflasi Inflasi Terhadap Terhadap Terhadap Pertumbuhan Pertumbuh.* 1–22. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika: esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*.
- Arvin, M. B., Pradhan, R. P., & Nair, M. S. (2021). Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue and economic growth? Evidence from

- low-income and lower middle-income countries. *Economic Analysis and Policy*, 70, 468–489. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.03.011>
- Åsa Johansson, Christopher Heady, Jens Arnold, B. B. and L. V. (2000). Taxation and Economic Growth. *Fiscal Studies*, 21(1), 141–168. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2000.tb00583.x>
- Atems, B. (2015). Another look at tax policy and state economic growth: The long-run and short-run of it. *Economics Letters*, 127, 64–67. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.12.035>
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(97\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00033-0)
- Chakraborty, C., & Basu, P. (2002). Foreign direct investment and growth in India: A cointegration approach. *Applied Economics*, 34(9), 1061–1073. <https://doi.org/10.1080/00036840110074079>
- Chowdhury, A., & Mallik, G. (2001). *Asia-Pacific Development Journal Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (Vol. 8, Issue 1).
- Dackehag, M y Hansson, Å. (2012). Taxation of Income and Economic Growth: An Empirical Analysis of 25 Rich OECD Countries. *Journal of Economic Development*, 21(1), 93–118.
- De Gregorio, J. (1992). The effects of inflation on economic growth. Lessons from Latin America. *European Economic Review*, 36(2–3), 417–425. [https://doi.org/10.1016/0014-2921\(92\)90098-H](https://doi.org/10.1016/0014-2921(92)90098-H)
- De Mello Jr., L. R. (1999). Foreign Direct Investment-Led Growth: Evidence from Time Series and Panel Data. *Oxford Economic Papers*, 51(1), 133–151. <http://oep.oxfordjournals.org/content/51/1/133.short>
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop\*, Heng-fu Zou. *Journal Monetary Economics*, 37, 313–344.

- Durusu-Ciftci, D., Gokmenoglu, K. K., & Yetkiner, H. (2018). The heterogeneous impact of taxation on economic development: New insights from a panel cointegration approach. *Economic Systems*, 42(3), 503–513. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.01.001>
- Ebimobowei, A. (2010). The Relationship Between Fiscal Policy and Economic Growth in Nigeria (1991-2005). *International Journal of Economic Development Research and Investment*, 1(2), 37–47.
- Eggoh, J. C., & Khan, M. (2014). On the nonlinear relationship between inflation and economic growth. *Research in Economics*, 68(2), 133–143. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2014.01.001>
- Faraji Kasidi, K. M. (2011). Impact Of Inflation On Economic Growth: A Case Study Of Tanzania. *Nature*, 253(5486), 11–12. <https://doi.org/10.1038/253011b0>
- Fazzari, S. M. (1994). Why Doubt the Effectiveness of Keynesian Fiscal Policy? *Journal of Post Keynesian Economics*, 17(2), 231–248. <https://doi.org/10.1080/01603477.1994.11490025>
- Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485–512. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90027-D](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90027-D)
- Gamayuni, R. R. (2016). The Effect of Local Government Characteristics and the Examination Result of Indonesian Supreme Audit Institution on Economic Growth , with Financial Performance as Intervening Variable in District and City Government of Lampung Province. *Research Journal of Financial and Accounting*, 7(18), 75–81.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Gupta, S., Clements, B., & Tiongson, E. (1998). Economic Policy and Equity: Public Spending on Human Development. *Finance and Development*, 35(3), 10–13. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0035/003/article-A003-en.xml>
- Gurdal, T., Aydin, M., & Inal, V. (2021). The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches. In *Economic Change and Restructuring* (Vol. 54, Issue 2). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10644-020-09280-x>
- Haddad, M., & Harrison, A. (1993). Are there positive spillovers from direct foreign

- investment?. Evidence from panel data for Morocco. *Journal of Development Economics*, 42(1), 51–74. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(93\)90072-U](https://doi.org/10.1016/0304-3878(93)90072-U)
- Halıcı-Tülüce, N. S., Doğan, İ., & Dumrul, C. (2016). Is income relevant for health expenditure and economic growth nexus? *International Journal of Health Economics and Management*, 16, 23–49.
- Hapsari, R. D., & Prakoso, I. (2016). Penanaman Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 211. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.554>
- Herman Ardiasyah. (2017). Arah Dan Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia Makin Menyimpang Dari Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(3), 327–340.
- Hermes, N., & Lensink, R. (2003). The Journal of Development Studies Foreign direct investment, financial development and economic growth Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth. *The Journal of Development Studies*, 40(1), 142–163. <http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=fjds20%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00220380412331293707>
- Hicks, J. R. (n.d.). *The Social Framework JR.HICKS 1942.pdf*. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.187339/page/n1/mode/2up>
- Hong, L. (2014). Does and How does FDI Promote the Economic Growth? Evidence from Dynamic Panel Data of Prefecture City in China. *IERI Procedia*, 6, 57–62. <https://doi.org/10.1016/j.ieri.2014.03.010>
- Hughes, J. F.-. (1386). *The Theory, Principles and Management of Taxation*.
- IMF. (2002). *Handbook of National Accounting Use of Macro Accounts in Policy Analysis* (Issue 81).
- Irandoust, M. (2019). Wagner on government spending and national income: A new look at an old relationship. *Journal of Policy Modeling*, 41(4), 636–646. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.02.003>
- Ismail Fahmi Lubis. (n.d.). *Analisis Hubungan Antara Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Iindonesia*. 03(01), 41–52. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better->

mfi-results

- Izzah, N. (2015). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Riau Tahun 1994-2013. *At-Tijarah*, 1(2), 156–172.
- Jalata, D. (2014). The Role of Value Added Tax on Economic Growth of Ethiopia. *Science, Technology and Arts Research Journal*, 3(1), 156. <https://doi.org/10.4314/star.v3i1.26>
- Jamil, H., & Santosa, D. B. (2017). *Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia*. 1–4.
- Jiang, S. (2006). An Empirical Study on China's Regional Tax Revenue Performance. *Database, January*.
- Kalaš, B., Mirović, V., & Milenković, N. (2018). The relationship between taxes and economic growth: Evidence from Serbia and Croatia. *The European Journal of Applied Economics*, 15(2), 17–28. <https://doi.org/10.5937/ejae15-18056>
- Kar, M., & Taban, S. (2003). The impacts of the disaggregated public expenditure on economic growth. *Ankara University Faculty of Political Science*, 53(3), 145–169.
- Keynes, J. M. (1937). Quarterly Journal of Economics the General Theory of Employment. *Quarterly Journal of Economics*, 51, 209–223. <http://qje.oxfordjournals.org/>
- Khan, S. A. R., Zhang, Y., Kumar, A., Zavadskas, E., & Streimikiene, D. (2020). Measuring the impact of renewable energy, public health expenditure, logistics, and environmental performance on sustainable economic growth. *Sustainable Development*, 28(4), 833–843.
- Kholis, M. (2012). Dampak Foreign Direct Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia; Studi Makroekonomi Dengan Penerapan Data Panel. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 111–120. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.260.2012>
- Koguchi, Y. (n.d.). *Invitation to Macro-Accounting*.
- Landau, D. (2013). Government Expenditure and Economic Growth : Government Expenditure A Cross-Country Study. *Southern Economic Journal*, Vol. 49, No. 3 (Jan., 1983), Pp. 783-792, 49(3), 783–792. <http://www.jstor.org/stable/1058716>

- Laranga, R. N., Engka, D. S. M., & Kawun, G. M. V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun (2004 - 2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 218–229.
- Le, M. V., & Suruga, T. (2005). Foreign direct investment, public expenditure and economic growth: The empirical evidence for the period 1970-2001. *Applied Economics Letters*, 12(1), 45–49. <https://doi.org/10.1080/1350485042000293130>
- Lesfandra, L. (2021). Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing, Dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7(2), 180–188. <https://www.jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/45>
- Lestari Agusalim. (2014). Pajak ekspor, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan: kasus agroindustri di indonesia. *Kinerja*, 18(2), 180–194.
- Levine, R., & Renelt, D. (1992). A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. *American Economic Review*, 82(4), 942–963.
- Lewis T. Preston. (1993). *The East Asian Miracle*.
- Lichtenberg, F., & de la Potterie, B. van P. (1996). International R&D Spillovers: A Re-Examination. *Nber Working Paper Series*. <http://www.nber.org/papers/w5668.pdf>
- Marbuah, G. (2010). On the Inflation-Growth Nexus: Testing for Optimal Inflation for Ghana. *Vol. 11, No.2 Journal of Monetary and Economic Integration*, 11(2), 1–29.
- Maulid, L. C., Bawono, I. R., & Sudibyoy, Y. A. (2021). The Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 24. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v16i1.3172>
- Maulid, L. C., Bawono, I. R., & Sudibyoy, Y. A. (2022). Analysis of Causality among Tax Revenue, State Expenditure, Inflation, and Economic Growth in Indonesia between 1973 and 2019. *Public Policy and Administration*, 21(1), 143–157. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.21.1.29950>
- Michael C. Jensen, & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Owner Structure. *Journal of Financial Economics*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

- Minea, A. (2008). The Role Of Public Spending In The Growth Theory Evolution. *Methods*, 99–120.
- Mubarik, Y. A. (2005). Threshold level of inflation in Pakistan. *SBP-Research Bulletin*, 1(1), 35–43.
- Nair-Reichert, U., & Weinhold, D. (2001). Causality tests for cross-country panels: A new look at FDI and economic growth in developing countries. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 63(2), 153–171. <https://doi.org/10.1111/1468-0084.00214>
- Nasab, V. B., Kamali, E., & ... (2020). Scheme of Recent Advances in the Field of Accounting and Economics: Application of Macro Accounting Theory in Economic Forecasting. ... *Journal of Accounting* .... <https://doi.org/10.22067/ijaaf.2020.39260>
- Nasution, D. P., Daulay, M. T., & Handani, E. (2021). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Medan. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 14(1), 33–49.
- Ogbonna, G. ., & Appah, E. (2016). Effect of tax administration and revenue on economic growth in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(13), 49–58.
- Ogeh, V. O., Harvey, S. K., & Hagan, E. (2008). Fiscal policy, private investment and economic growth: The case of Ghana. *Studies in Economics and Finance*, 25(2), 112–130. <https://doi.org/10.1108/10867370810879438>
- Ojede, A., & Yamarik, S. (2012). Tax policy and state economic growth: The long-run and short-run of it. *Economics Letters*, 116(2), 161–165. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2012.02.023>
- Onakoya, A. B., Afintinni, O. I., & Ogundajo, G. O. (2017). Taxation revenue and economic growth in Africa. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(2), 11–22. <https://doi.org/10.5897/jat2016.0236>
- Palley, T. (2017). The General Theory at 80: Reflections on the history and enduring relevance of Keynes' economics. *Investigacion Economica*, 76(301), 87–101. <https://doi.org/10.1016/j.inveco.2017.12.003>
- Pangarkar, N., Lim, H., Chang Moon, H., Rugman, A. M., Verbeke, A., Ellingsen, G., Lecraw, D. J., Ratiphokhin, R., Low, L., Ramstetter, E. D., Yeung, H. W.-C., Feridun,

- M., & Sissoko, Y. (2011). Impact of FDI on Economic Development : A Causality Analysis for Singapore , 1976 – 2002. *International Business Review*, 4(2), 601–624.
- Paul, S., Kearney, C., & Chowdhury, K. (1997). Inflation and economic growth: A multi-country empirical analysis. *Applied Economics*, 29(10), 1387–1401.  
<https://doi.org/10.1080/00036849700000029>
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). Determinants of Government Expenditure. *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, I*, 12–34.
- Pelinescu, E., & Dulescu, M. (2009). The impact of foreign direct investment on the economic growth and countries' export potential. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 12(4), 153–169.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024. (2021). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870*, 2021–2024.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.* (2016).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020. (2020). *PERPRES NO.72 Tahun 2020. 040658*.
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management, & Accounting*, 1(1), 104–120.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.*
- Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (n.d.). *Ekonomi Makro Teori dan Kebijakan.*
- Putri, Y., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 102918.
- Quartey, P. (2010). Price Stability and the Growth Maximizing Rate of Inflation for Ghana. *Modern Economy*, 01(03), 180–194. <https://doi.org/10.4236/me.2010.13021>
- Republik Indonesia. (2007). UU RI no.25 tahun 2007. *Sistem Perencanaan Pembangunan*

*Nasional.*

- Rinova, R., & Dewi, F. G. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 1–17. <https://doi.org/10.23960/jak.v24i2.192>
- Rudiningtyas, D. A. (2008). *Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran (Studi Pada APBN 2004-2008)*. 49(1), 69–73.
- Rumalutur, T., Kasmando, H. R., Marlissa, E. R., & Siahainenia, J. E. H. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 6(3), 9–16. <https://doi.org/10.56076/jkesp.v6i3.2165>
- S.C.Yu. (2000). Micro and macro cracks. In *Engineering Fracture Mechanics* (Vol. 95, p. 1). <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2012.10.005>
- Safira, S., Djohan, S., & Nurjanana, N. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kalimantan timur. *Forum Ekonomi*, 21(2), 211–216.
- Saragih, A. H. (2022). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(November), 109–115.
- Stoilova, D. (2017). Sistema fiscal y el crecimiento económico: evidencia de la Unión Europea. *Contaduria y Administracion*, 62(3), 1041–1057. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006>
- Suhendro, S., Azis, A. D., & Maulana Zulma, G. W. (2021). Pengaruh Governance terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 535. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.410>
- Sukirno, S. (2009). *Sukirno, Sadono. 2009. TeoriPPengantar: Mikroekonomi. Depok: PT Raja Grafindo Persada.*
- Sumaryani, W. N. (2019). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan

- Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.84>
- Suparno, H. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 1–22.
- Swanson, G. A., & Bailey, K. D. (2006). Social Entropy Theory, Macro Accounting, and entropy related measures. *50th Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences 2006, ISSS 2006, 1(1850)*, 159–174.
- Szkorupová, Z. (2014). A Causal Relationship between Foreign Direct Investment, Economic Growth and Export for Slovakia. *Procedia Economics and Finance*, 15, 123–128. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00458-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00458-4)
- Takumah, W., & Iyke, B. N. (2017). The links between economic growth and tax revenue in Ghana: An empirical investigation. *International Journal of Sustainable Economy*, 9(1), 34–55. <https://doi.org/10.1504/IJSE.2017.080856>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Economic development*. Pearson education.
- Umaru, A., & Zubairu, A. A. (2012). Effect of Inflation on the Growth and Development of the Nigerian Economy (An Empirical Analysis). *International Journal of Business and Social Science*, 3(10), 183. [www.ijbssnet.com](http://www.ijbssnet.com)
- Undang-Undang Dasar 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*. 105(3), 129–133.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003. (2003). *Keuangan Negara*. 1, 1–40.
- Undang-undang nomor 28 tahun 2007. (2007). *Tata Cara Perpajakan*. 2000.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (2021). 1–6.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. (2009). 12–42.
- Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 30660.
- Xu, B. (2000). Multinational enterprises, technology diffusion, and host country productivity

growth. *Journal of Development Economics*, 62(2), 477–493.

[https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(00\)00093-6](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(00)00093-6)

Yi, F., & Suyono, E. (2014). The Relationship between Tax Revenue and Economic Growth of Hebei Province Based on The Tax Multiplier Effect. *Global Economics and Finance Journal*, 7(2), 1–18. <https://doi.org/10.21102/gefj.2014.09.72.01>

Yumuşak, I. G., & Yıldırım, D. Ç. (2009). An econometric examination over the relation between health expenditure and economic growth. *The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management*, IV, 7(23), 57–70.

Zhuang, J., & Dowling, M. (2003). Lessons of the Asian financial crisis: What can an early warning system model tell us? *Asian Development Review*, 20(1), 100–113.